

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ROYALTI PENULIS
BUKU (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
Desy Listhiana Anggraini

NPM : 1321030008

Program Studi : Mu'amalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ROYALTI PENULIS
BUKU (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

**Desy Listhiana Anggraini
NPM : 1321030008**

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ROYALTI PENULIS BUKU (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)

Oleh
Desy Listhiana Anggraini

Penulis dan penerbit adalah dua pihak yang tidak bisa dipisahkan dari dunia literasi. Keduanya memiliki peran penting untuk mencapai tujuan bersama, salah satunya adalah memperoleh keuntungan dari karya yang dibukukan. Kerjasama antara penulis dan penerbit yang terjadi pada Aura Publishing Bandarlampung merupakan bentuk kerjasama bagi hasil. Kedua pihak telah bersepakat untuk menjalin kerjasama yang dibuktikan oleh kontrak kerjasama. Di dalam kontrak kerjasama, penulis mendapat bagian keuntungan dari penjualan buku yang kemudian disebut royalti, sebesar 10%. Royalti tersebut diberikan kepada penulis setelah enam bulan dari buku terbit, hal ini terjadi karena perhitungan penjualan yang dilakukan oleh penerbit melalui distributor dan toko buku.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku, serta untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil berupa royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dan diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna menghimpun data-data di lapangan tentang praktik kerjasama penulis dan penerbit Aura Publishing Bandarlampung, serta pandangan penulis tentang royalti. Kerjasama bagi

hasil digunakan sebagai landasan teoritis pembahasan skripsi ini. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interview sebagai metode pengumpulan data utama, dan dokumentasi sebagai metode pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku pada Aura Publishing sudah ditetapkan bersama-sama dan dituangkan dalam kontrak kerjasama. Pembagian royalti 10% untuk penulis adalah angka yang wajar dan umum dipakai oleh penerbit di Indonesia. Adapun dalam pandangan Hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil berupa royalti antara penulis dan penerbit Aura Publishing sah dan tidak bertentangan dengan hukum *Mudharabah*.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Desy Listhiana Anggraini
NPM : 1321030008
Prodi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
ROYALTI PENULIS BUKU (Studi pada
Aura Publishing Bandarlampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II,

Drs. H. A. Jalaluddin, S.H., MM
NIP. 195703051978031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ROYALTY PENULIS BUKU (Studi pada Aura Publishing Bandar Lampung)** yang disusun oleh **Desy Listhiana Anggraini, NPM. 1321030008**, Program Studi **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Jum'at, 28 Juni 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.** 

Sekretaris: **Muslim, S.H.I., M.H.I.**

Penguji I : **Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.** 

Penguji II: **Drs. H. Irwantoni, M.Hum.** 



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. H. Tahmid, M.H. 

NIP. 10221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 106

RIWAYAT HIDUP

1. Desy Listhiana Anggraini lahir di Metro, 06 Desember 1995, anak dari pasangan Bapak Parjiono dan Ibu Yenny Christiana. Putri pertama dari tiga bersaudara.
2. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanan (TK) Dharma Wanita, Metro Utara, Kota Metro, Lampung pada tahun 2000-2001.
3. Melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Trimurjo tahun 2001 saat duduk di kelas 1. Kemudian pindah ke SDN 3 Metro Utara saat duduk di kelas 2 dan 3. Kemudian pindah lagi ke SDN 1 Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandarlampung hingga lulus pada tahun 2007.
4. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bandarlampung dan lulus pada tahun 2010.
5. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Al-Fatah, Natar, Lampung Selatan hingga lulus pada tahun 2013.
6. Kemudian di tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi ‘Alamin... Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberiku kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa beriman, bertaqwa, berpikir, bersabar, lagi beruntung dalam menjalani kehidupan ini. Aamiin.

Sebuah karya kecil telah lahir dari doa-doa dan jerih payah orang-orang di sekitarku, maka kupersembahkan karya kecil ini untuk mereka. Seluruh cinta dan rasa syukur kucurahkan kepada:

1. Orang tua: Mamak dan Bapakku tercinta, yang tak pernah putus mendo’akan dan menginspirasi setiap langkahku mengarungi kehidupan, terutama untuk menyelesaikan satu langkah kecilku dalam dunia pendidikan.
2. Adik-adikku tercinta, Raihan Ardian Razak dan Saskia Hanah Nurrohmah, yang selalu menjadi tempat kembali sepulang penat sehari-hari, serta selalu menjadi sumber keceriaanku.
3. Mbah, Atung, dan Nenekku yang selalu melimpahkan cinta, kasih sayang, dan motivasi untuk tetap kuat dan sabar menjalani kehidupan.
4. Sahabatku, Novriyanti, S.Th.I yang kehadirannya selalu ditunggu, terimakasih atas do’a, waktu, dan pengorbanannya selama ini.
5. Seluruh keluarga besar yang tak bisa kusebutkan satu-persatu, terimakasih atas do’a baik yang selalu diberikan.
6. Almamaterku, terimakasih telah memberi banyak pelajaran hidup untukku.

Tiada ucapan yang bisa membalas cinta, ketulusan, kebaikan, dan pengorbanan mereka selain *Jazaakallah Khairan Katsir*, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda. Aamiin Allahuma Aamiin.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah swt., pengenggam diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Alquran dan Hadits.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Drs. H. Irwantoni, M.Hum dan Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan peneliti hingga skripsi ini selesai.
3. Khoiruddin, M.Si dan Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang tulus ikhlas memberikan ilmunya di setiap kesempatan.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan, Fakultas Syariah, serta Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung yang selalu menjadi tempat ternyaman menyelesaikan tugas-tugas.

7. Mas Ikhsanuddin, M.M. selaku Pimpinan Aura Publishing Bandarlampung yang telah membuka kesempatan untuk menjadikan Aura Publishing sebagai tempat penelitianku.
8. Umi Neny Suswati, Mbak Izzah Annisa, dan semua pihak yang bersedia menjadi sumber penelitian ini.
9. Seluruh sahabat di Angkatan 13 Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah, yang telah menemani hari-hari selama perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terimakasih atas banyak pelajaran hidup yang kalian berikan.
11. Seluruh teman-teman komunitas dan organisasi yang telah memberi banyak pengalaman berharga.
12. Seluruh guru-guru kehidupan di manapun berada, serta untuk seluruh orang yang mengenalku.

Karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Amiin Ya Rabbal 'Alamin.

Bandarlampung, Mei 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perikatan dan Perjanjian dalam Islam (<i>'Aqad</i>).....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>'Aqad</i>	15
2. Rukun-rukun <i>'Aqad</i>	18
3. Syarat-syarat <i>'Aqad</i>	20
4. Macam-macam <i>'Aqad</i>	24
5. Batalnya <i>'Aqad</i>	26
B. Bagi Hasil Dalam Islam (<i>Mudharabah</i>).....	30
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	40
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	49

5. Prinsip <i>Mudharabah</i>	50
6. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	57
7. Hikmah <i>Mudharabah</i>	60
C. Teori Tentang Royalti	62
1. Pengertian Royalti	64
2. Dasar Hukum Royalti	66
3. Macam-macam Royalti Penulis Buku	68
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Aura Publishing.....	75
1. Sejarah Berdirinya Aura Publishing.....	75
2. Visi dan Misi Aura Publishing	78
3. Macam-Macam Sistem Penerbitan pada Aura Publishing	79
B. Sistem Bagi Hasil Royalti antara Penulis dan Aura Publishing Bandarlampung	85
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Sistem Penetapan dan Pembagian Royalti pada Aura Publishing.....	91
B. Analisis Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku pada Aura Publishing.....	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ROYALTI PENULIS BUKU (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)”, untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam adalah kumpulan upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.¹ Hukum Islam juga merupakan seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk seluruh umat Islam.²

Royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual.³ Secara umum, royalti penulis adalah imbalan yang dibagi antara penerbit dan penulis atas pemanfaatan, pengeksploitasian, atau

¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009), hlm. 41.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 6.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 511.

penggunaan suatu ciptaan. Yang berhak terhadap royalti adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta. Besarnya jumlah royalti biasanya dibagi atas kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.⁴ Dalam penelitian ini royalti penulis buku yang dimaksud adalah uang jasa atau imbalan yang diberikan oleh penerbit Aura Publishing kepada penulis berdasarkan pembagian persentase harga jual buku dan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Hak atas royalti dipegang oleh Pencipta yakni Penulis atau Pengarang.

Aura Publishing adalah badan usaha yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan yang ada di wilayah Bandarlampung.

Jadi yang peneliti maksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku (Studi pada Aura Publishing Bandarlampung)” adalah bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penetapan dan pembagian uang jasa atau imbalan yang diberikan oleh Penerbit Aura Publishing kepada penulis buku.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan peneliti tertarik untuk menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif, mengingat munculnya banyak penerbit yang menawarkan jasa penerbitan dan percetakan kepada penulis yang ingin menerbitkan naskahnya menjadi sebuah buku dan proses panjang yang dilalui oleh penulis dalam menyelesaikan tulisannya. Oleh karena itu, perlu dipahami

⁴Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), hlm. 165

benar hubungan kerjasama antara penulis dan penerbit, salah satunya pembagian royalti berdasarkan persentase dari penerbit kepada penulis agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari yakni di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong setiap muslim untuk selalu bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha-usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, diantara usaha-usaha itu, ada yang membutuhkan modal, tenaga, dan pikiran lebih. Untuk itu Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam melakukan usaha-usaha agar hasil dan tujuan usaha itu tercapai. Sikap tolong menolong dan bekerjasama dalam Islam banyak bentuknya, salah satunya *mudharabah* yakni kerjasama dalam hal modal dan tenaga yang keuntungannya kemudian dibagi bersama.

Bentuk kerjasama *mudharabah* sangat dianjurkan karena seringkali seorang yang mampu menyediakan modal, tidak mempunyai keterampilan dan tenaga untuk mengelola modal tersebut. Sebaliknya, ada juga seorang yang punya keterampilan dan tenaga namun tidak punya modal untuk melakukan usaha. Sehingga dua tipe orang ini dapat melakukan usaha bersama-sama, satu pihak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan yang lain sebagai pekerja atau pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi dengan jelas sesuai kesepakatan bersama.

Praktik kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dianjurkan selama bentuk kerjasamanya sesuai dengan syariat, artinya tidak dalam bentuk dosa, maksiat, dan permusuhan. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai jenis usaha, baik dalam pertanian, peternakan, dan perdagangan.

Perintah untuk bekerjasama salah satunya tertuang dalam penggalan surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menerangkan tentang praktik *mudharabah*:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

“Dari Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya Usman Bin Affan memberinya harta dengan cara *qiradh* yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua.”⁵ (HR. Imam Malik)

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyr Al Misriyyah, t.th)

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa *mudharabah diqiyaskan* kepada *musaqah* yakni kerja antara pemilik sawah dengan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Sebab keduanya mempunyai kesamaan, yakni setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya, walaupun belum diketahui berapa besarnya.

Dewasa ini, kegiatan menulis sudah dijadikan sebagai profesi bagi sebagian orang. Mereka menulis jenis tulisan yang berbeda-beda, ada buku-buku pelajaran, karya ilmiah, hasil penelitian, fiksi, dan lain sebagainya. Namun penulis membutuhkan penerbit dan percetakan untuk mengelola hasil tulisannya tersebut, sehingga dapat diperjual-belikan dan dibaca oleh masyarakat. Sementara, penerbit juga membutuhkan penulis untuk memenuhi kebutuhan naskah dan menjalankan usaha penerbitannya. Oleh karena itu, penulis dan penerbit kemudian bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yakni memperoleh keuntungan dari usaha mereka. Dari kerjasama inilah penulis dan penerbit membagi keuntungan sesuai kesepakatan awal. Penulis mendapatkan hasil dari usahanya menulis buku yang disebut honorarium atau royalti, sedangkan penerbit mendapat bagian keuntungan karena telah mengelola naskah tersebut.

Aura Publishing adalah salah satu penerbit yang ada di wilayah Bandarlampung yang bekerjasama dengan penulis-penulis Lampung maupun Nasional untuk menerbitkan karya. Penulis buku memberikan modal berupa naskah, sementara Aura Publishing mengelola naskah tersebut sehingga layak diperjualbelikan.

Pembagian hasil penjualan atau royalti seorang penulis buku diberikan dengan berbagai cara, antara lain sistem persentase, sistem termin, sistem bagi hasil, dan sistem lepas atau penjualan Hak Cipta.⁶ Penelitian ini terfokus pada honorarium atau royalti yang diberikan melalui sistem persentase.

Sebelum membahas royalti, ada baiknya peneliti menguraikan beberapa sistem penerbitan yang ada pada Aura Publishing. Antara lain :

1. Sistem Penerbitan Indie (*Self Publishing*)

Sistem penerbitan indie adalah sistem penerbitan dimana penerbit hanya menjadi wadah untuk menerbitkan dan mencetak karya penulis menjadi sebuah buku yang siap dijual. Penulis hanya perlu membayar penerbit sesuai dengan biaya cetak yang ditetapkan penerbit. Untuk harga jual dan teknik penjualan buku, sepenuhnya ditanggung penulis.⁷

Keuntungan jika menggunakan sistem ini ialah penulis dapat bebas menentukan harga dan mengambil keuntungan. Namun kelemahannya ialah penulis harus pintar-pintar mengatur strategi agar buku tersebut laku karena penulis harus menjual sendiri bukunya, tidak bisa memakai jasa distributor seperti toko-toko buku. Adapun kerjasama bagi hasil antara penulis dan penerbit dalam sistem penerbitan indie ialah penerbit membantu penjualan buku tersebut dengan ketentuan penerbit menerima bagian keuntungan sebesar 20% dari harga jual buku yang ditentukan penulis.

⁶Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 59

⁷ Aura Publishing, *Company Profile*, (Bandarlampung: Aura Publishing, tth), hlm. 6

2. Sistem Penerbitan Mayor (*Mayor Publishing*)

Berbanding terbalik dengan Sistem Penerbitan Indie, Sistem Penerbitan Mayor adalah sistem penerbitan di mana penulis hanya perlu mengirim naskahnya kepada penerbit, kemudian semua biaya ditanggung oleh penerbit. Mulai dari biaya terbit, biaya cetak, distributor, promosi, dan lain sebagainya. Penerbit akan mencetak dan menerbitkan buku dalam jumlah besar, biasanya di atas 1000 eksemplar. Penulis hanya perlu menunggu royalti dari hasil penjualan buku tersebut.⁸

Keuntungan pada sistem ini adalah penulis tidak perlu mengeluarkan biaya di awal. Tidak perlu menjual bukunya kepada perorangan karena sudah dijual pada distributor dan dipajang di toko-toko buku. Namun ada beberapa kelemahan pada sistem ini, yakni penulis tidak bisa menentukan margin keuntungan dari harga jual buku. Sehingga apabila buku tidak laku maka royalti yang diterima penulis akan sangat kecil. Penulis juga tidak dapat memperoleh royalti secara langsung dan sekaligus. Penulis mendapatkan royalti sebesar 10% dari harga jual buku dan royalti tersebut akan dibayarkan 6 (enam) bulan setelah buku terbit.

Meskipun dalam pengertiannya royalti merupakan imbalan atau uang jasa yang diberikan penerbit kepada penulis, namun dalam praktiknya peneliti menemukan kesamaan unsur antara kerjasama penulis dan penerbit dengan praktik kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasil tersebut dapat dilihat dari

⁸ *Ibid.*

pembagian keuntungan berdasarkan persentase harga jual buku yang sudah disepakati dalam sebuah perjanjian (*'aqad*). Penulis, penerbit, dan toko buku mendapatkan bagian keuntungannya masing-masing sesuai pekerjaan mereka.

Dari uraian di atas, praktik kerjasama antara penulis buku dan penerbit dapat diqiyaskan dengan praktik *mudharabah*. Penulis sebagai pemilik modal yang menyerahkan modal (berupa naskah) kepada penerbit, kemudian modal tersebut dapat diproduksi oleh penerbit dengan usaha-usaha tertentu. Dalam kerjasama penulis buku dan penerbit, selain pihak penerbit dan penulis, terdapat pula pihak toko buku yang ikut bersama-sama mengelola modal (naskah) sehingga naskah tersebut menghasilkan keuntungan.

Menurut hasil wawancara, praktik pemberian royalti pada Aura Publishing kepada penulis diketahui sudah ditentukan jumlahnya yakni sebesar 10% dari harga jual buku. Selain itu, penulis yang telah selesai menulis naskahnya harus menunggu pembayaran royalti sampai buku tersebut terjual, royalti akan diberikan setiap 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan kemudian.⁹ Sementara itu, dalam penerbitan indie, penerbit mendapatkan bagian keuntungan sebesar 20% dari penjualan buku melalui penerbit.

Praktik kerjasama bagi hasil antara penulis dan penerbit dalam hal pembagian royalti dan bagi hasil penjualan merupakan sesuatu yang tergolong baru, sehingga perlu dikaji lebih dalam serta ditinjau dari Hukum Islam berdasarkan rukun dan syarat kerjasama bagi hasil atau *mudharabah*.

⁹ Ikhsanuddin (Direktur Aura Publishing), wawancara pra-riset pada Aura Publishing Bandarlampung, 20 Desember 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada penulis dan penerbit mengenai royalti dalam tinjauan Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah. Selain itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya penelitian ini mengkaji suatu kerjasama yang muncul dengan konsep yang tergolong baru dengan menggunakan konsep Hukum Islam untuk melahirkan perspektif yang terfokus dalam sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.¹⁰ Dalam hal ini peneliti akan mengangkat data dan permasalahan serta mengamati secara langsung pada Aura Publishing.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menuliskan, menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan di masyarakat dengan tujuan mendapatkan gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga informasi yang disampaikan sama sebagaimana adanya, sesuai kenyataan yang ada.¹¹

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), hlm. 33.

¹¹ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 21.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara bertahap dan berlanjut dengan cara deskriptif dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran secermat mungkin tentang keadaan sebenarnya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan mendeskripsikan sistem penetapan dan pembagian royalti penulis buku pada Aura Publishing kemudian dianalisa menurut perspektif Hukum Islam.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum royalti penulis buku terkait sistem penetapan dan pembagian. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Menurut Sumadi Suryabrata data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹² Data primer dari penelitian ini diperoleh dari Aura Publishing yakni penerbit selaku pihak yang membayarkan royalti dan penulis sebagai penerima royalti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri.¹³ Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun pendapat orang lain

39. ¹² Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.

¹³ *Ibid.*

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang bisa berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak penerbit Aura Publishing dan penulis yang telah menerbitkan karyanya di Aura Publishing.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi dan digunakan sebagai objek penelitian.

Mengingat jumlah populasi yang hanya terdiri dari pihak penerbit dan penulis, maka peneliti mengambil tiga sampel yakni satu dari pimpinan penerbit dan dua dari penulis penerima royalti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan

¹⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta : Andi, 2010), hlm. 176

hipotesis penelitian. *Interview* yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu.¹⁵ *Interview* atau wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan data atau keterangan dari informan. Pada praktiknya peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak yang terkait yakni penulis dan penerbit.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁶ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data tertulis maupun elektronik dari penulis dan Aura Publishing Bandarlampung yang berkaitan dengan penetapan dan pembagian royalti tersebut.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu sistem royalti penulis buku ditinjau dari Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis bertujuan untuk mengetahui penetapan dan pembagian royalti dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

¹⁵ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 187.

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Op. Cit*, hlm. 48

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dengan lebih umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal berkenaan dengan penetapan dan pembagian royalti penulis buku ditinjau dari Hukum Islam. Hasil analisa dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perikatan dan Perjanjian dalam Islam ('*Aqad*)

1. Pengertian Dan Dasar Hukum '*Aqad*

Menurut bahasa '*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain (*ar-rabthu*) mengikat, (*'aqdatu*) sambungan, dan (*al'ahudu*) janji.¹⁷

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*'aqdatu*) adalah sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al'ahudu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran (3) ayat 76:


بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan takut pada Allah, Maka sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹⁸

Dasar hukum '*Aqad* terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 yang juga menyebutkan *Al'aquudu* yang berarti janji atau akad dalam jumlah jamak.

¹⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.”¹⁹

Kata *al-‘aqdu* (*al-‘uquud*) dalam ayat di atas bermakna bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Istilah *al-‘aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHP Perdata. Sedangkan istilah *al-‘ahdu* dalam Q.S Al-Imran (3) ayat 76 dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.²⁰

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengungkapkan bahwa *‘aqad* mencakup tiga hal, yaitu:²¹

- 1) Perjanjian
- 2) Persetujuan dua pihak atau lebih, dan
- 3) Perikatan.

Pengertian lain dari *‘aqad* adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak kedua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²² Sedangkan dalam pandangan syariat, suatu *‘aqad* merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan dua pihak atau lebih yang memiliki keinginan untuk mengikatkan diri. Keinginan tersebut sifatnya

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 106

²⁰ Pendapat Fathurrahman Djamil yang dikutip Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 45

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 45

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010), hlm. 68

tersembunyi di dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan keinginan tersebut pihak-pihak mengungkapkannya dalam suatu pernyataan, pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pihak pertama disebut *mu'jib* dan pihak kedua disebut *qaabil*.²³

Pendapat tentang '*aqad* lainnya diungkapkan oleh ahli fiqih, Hasbi Ash-Shiddieqy, ia mendefinisikan '*aqad* sebagai perikatan antara ijab dengan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' untuk menetapkan keridhaan kedua pihak.²⁴ Sejalan dengan pendapat sebelumnya, pendapat lain mengemukakan bahwa '*aqad* adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama (penjual) dan pihak kedua (pembeli) terhadap transaksi suatu barang yang dibenarkan oleh syara'.²⁵ Sementara para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai berikut : pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁶

Menurut Abdoerraoef, ada tiga tahap yang dilalui suatu perikatan (*al-aqdu*) yakni sebagai berikut:²⁷

- 1) Al-'Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji itu mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janji tersebut.

²³ Ali Hasan, *Op.Cit.* hlm. 102-103

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 21

²⁵ Zainal Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 76

²⁶ *Op.Cit.* hlm. 46

²⁷ *Ibid*

- 2) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- 3) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu*' oleh AlQuran yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu*' itu, tetapi perikatan atau '*aqdu*'.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa '*aqad*' adalah kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syara' sehingga menimbulkan akibat hukum dan memberi hak serta kewajiban yang mengikat masing-masing pihak.

2. Rukun dan Syarat '*Aqad*'

a. Rukun '*Aqad*'

Suatu '*aqad*' akan menjadi *shahih* atau sah apabila semua rukunnya terpenuhi. Dan menjadi *bathil* atau batal apabila salah satu rukun tidak terpenuhi. Rukun-rukun dalam suatu '*aqad*' adalah sebagai berikut:²⁸

1. '*Aqidain*'

'*Aqidain*' yaitu dua pihak yang berakad. Masing-masing pihak bisa terdiri dari satu orang ataupun beberapa orang yang memiliki tujuan sama dan bersepakat untuk melakukan suatu akad.

²⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 47

2. *Ma'uquh 'alaih*

Ma'uquh 'alaih ialah benda atau objek yang diakadkan. Dalam buku Hukum Perikatan Islam Indonesia, objek akad disebut *Mahallul 'Aqd* yakni sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bisa dalam bentuk benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.

3. *Maqasidul 'Aqad* atau *Maudhu' al'aqad*

Maqasidul 'Aqad atau *Maudhu' al'aqad* ialah maksud atau tujuan dalam melakukan suatu '*aqad*. *Maudhu' al'aqad* adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad.²⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yakni sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.

²⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2017), hlm. 40

4. *Shighat al 'aqad* ialah ijab dan qabul atau serah terima, baik yang diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain secara otomatis.³⁰ *Ijab* ialah permulaan dan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak lain yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab yang mengandung penerimaan atau persetujuan.

b. Syarat 'Aqad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun akad, tetapi bukan merupakan esensi akad.³¹ Ulama Fiqih memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang '*aqid*, yaitu:³²

- 1) *Ahliyah* yaitu kecakapan, artinya seorang '*aqid* harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan sebuah kesepakatan. Seseorang memiliki *ahliyah* ketika ia sudah baligh atau mumayyiz dan berakal. *Mumayyiz* artinya ia dapat membedakan antara baik dan buruk, bahaya dan tidak berbahaya, dan menguntungkan atau merugikan. Berakal artinya ia tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang dengan baik.
- 2) *Wilayah*. Wilayah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapat legalitas secara syar'i untuk melakukan transaksi atas objek tertentu. Artinya orang tersebut adalah pemilik

³⁰ *Ibid*, hlm. 27

³¹ Oni Sahroni, *Op.Cit*, hlm. 27

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 48

yang sah dari suatu objek atau merupakan wali atau wakil dari pemilik asli sehingga ia memiliki hak untuk mentransaksikannya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali dalam mendapatkan *wilayah* ini adalah sebagai berikut:³³

- (1) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan tasharruf.
 - (2) Memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan maula'alaihi (yang diwakili).
 - (3) Mempunyai sifat adil, yaitu istikamah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
 - (4) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.
- 3) *Wakalah* (perwakilan), yaitu pengalihan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu. Dalam wakalah ini, wakil dan *muwakil* (yang diwakili) harus memiliki kecakapan ber-tasharruf yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Dengan demikian, harus jelas objek dan tujuan akad tersebut. Biasanya, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Sementara, Hamzah Ya'cub mengemukakan syarat-syarat subjek akad antara lain:³⁴

- 1) *Aqil* (berakal)

³³ Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm. 56

³⁴ *Ibid*, hlm. 55

Orang yang bertransaksi harus berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, maupun kurang akalnya karena masih di bawah umur. Sehingga ia bisa mempertanggung-jawabkan transaksi yang dibuatnya.

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi harus dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadaran saat bertransaksi. Artinya tidak diperbolehkan apabila ia mabuk atau pingsan.

3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan Q.S An-Nisa (4) ayat 29 dan Hadits Nabi SAW. yang mengemukakan prinsip *An-Taradhin* (rela-sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dan lepas dari paksaan ataupun tekanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Ma'uquh 'alaih* atau objek akad adalah sebagai berikut:³⁵

1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.

Alasannya bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk-bentuk akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaaqah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di

³⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 49

masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada istihsan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

2) Objek perikatan dibenarkan oleh *syara'*

Barang atau objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).³⁶

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu, objek akad dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah antara lain pelacuran dan pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan.

3) Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tak ada kesalahpahaman antara para pihak di kemudian hari. Kejelasan objek tersebut antara lain jelas bentuknya, fungsinya, dan keadaannya. Jika objeknya berupa jasa, maka harus diketahui keahliannya, keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersebut.

³⁶ Oni Sahroni, *Op. Cit*, hlm. 37

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada saat *shighat al'aqad*, antara lain:³⁷

- 1) Shighat harus jelas dan tidak mengandung banyak pengertian.
- 2) Ijab dan qabul harus sesuai. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- 3) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, saling ridha, dan tidak dalam paksaan atau tekanan.



³⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.43.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam '*aqad* yaitu:³⁸

- a. Pihak yang berakad ('*aqid*) harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan bertindak. Tidak sah suatu '*aqad* jika pihak yang berakat gila, tidak sadarkan diri, serta berada dalam pengampuan;
- b. Objek '*aqad* dapat menerima hukumannya;
- c. '*Aqad* tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya;
- d. '*Aqad* dapat memberikan faedah; dan
- e. *Ijab* terus berlangsung dan tidak dicabut sampai terjadi qabul. Jika ijab tidak bersambung sampai adanya qabul, maka '*aqad* tersebut batal.

Sementara pendapat lain tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian antara lain :³⁹

- a. Tidak menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan Hukum Syari'ah.
- b. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan maksudnya ada kebebasan kedua belah pihak dalam memilih tanpa adanya paksaan dan tekanan dari manapun.
- c. Perjanjian dan isi perjanjian harus jelas dan gamblang, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

i. Macam-macam '*Aqad*

³⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 50

³⁹ Pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2-3

Para Ulama mengemukakan bahwa '*aqad*' dapat dibagi menurut keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:⁴⁰

a. '*Aqad Shahih*

'*Aqad Shahih* yaitu '*aqad*' yang memenuhi rukun dan syarat. Sehingga berlaku pula seluruh akibat hukum yang ditimbulkan '*aqad*' itu, serta mengikat kedua pihak yang berakad.

Para Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi '*aqad shahih*' menjadi dua macam, yakni:

1. '*Aqad Nafidz*', yakni '*aqad*' yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya, serta tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2. '*Aqad Mauquf*', yaitu '*aqad*'-'*aqad*' yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan. Misalnya '*aqad fudhul*' yakni '*aqad*' yang berlaku setelah disetujui pemilik harta.⁴¹

Akad ini mempunyai pengaruh terhadap yang diakadkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika tidak, maka akad ini batal seperti tidak pernah ada. Pembagian ini disetujui oleh kalangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, karena menganggap sah akad *fudhul*.⁴²

Sedangkan dari kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, menurut yang paling kuat dari dua riwayat mereka bahwa akad tidak sah kecuali yang *nafidz*. Karena mereka menetapkan bagian dari syarat sah

⁴⁰ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108

⁴¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 53-54

⁴² Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 20

yaitu orang yang berakad mempunyai kuasa untuk melakukannya dan menurut mereka tidak ada akad yang *mauquf*.⁴³

b. 'Aqad yang tidak shahih

'*Aqad yang tidak shahih*, yaitu '*aqad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat. Ulama Hanafiyah membagi 'aqad yang tidak shahih menjadi dua macam, yaitu 'aqad yang fasad dan bathil*.⁴⁴

Dilihat dari segi wajib atau tidaknya, akad shahih dibagi menjadi dua yaitu akad *ladzim* dan *ghairu ladzim* (tidak lazim).⁴⁵

a. '*Aqad Ladzim* adalah akad shahih yang *nafidz* (dilaksanakan secara langsung), satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh* (membatalkan atau melepaskannya). Akad ini terbagi menjadi:

- 1) Akad *ladzim* yang tidak bisa dibatalkan sama sekali walaupun kedua belah pihak bersepakat untuk membatalkannya seperti akad nikah.
- 2) Akad *ladzim* yang bisa dibatalkan jika kedua belah pihak yang berakad berniat begitu, seperti akad jual beli, sewa menyewa, *muzara'ah*, *musaqat*, *shulh* (damai).

b. '*Aqad yang tidak ladzim* adalah akad yang mana kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan dengan cara *fasakh* tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain. Contohnya akad titipan, peminjaman, dan hibah.

⁴³ *Ibid*, hlm. 21

⁴⁴ Nasrun Harun, *Op.Cit*, hlm. 109

⁴⁵ *Op.Cit*, hlm. 22

5. Batalnya 'Aqad

Secara umum pembatalan perjanjian ('*aqad*) tidak mungkin dilakukan karena perjanjian terbentuk dengan kesepakatan kedua pihak. Namun batalnya perjanjian dapat dilakukan jika:⁴⁶

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, maka apabila sudah sampai pada waktu yang diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 4 :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya : *“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.”*⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas, khususnya pada kalimat *“penuhilah janjinya sampai batas waktunya”*, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang diperjanjikan, dengan demikian setelah batas waktu berakhir maka berakhir pula perjanjian ('*aqad*).

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 4

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 187

Apabila salah satu pihak menyimpang dari perjanjian maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 12 dan 13 :

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَيمَةَ الْكَافِرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا
تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: “jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”⁴⁸

Berdasarkan ayat-ayat di atas tergambar bahwa pembatalan perjanjian boleh dilakukan oleh satu pihak apabila pihak lain sudah menyimpang dari perjanjian.

c. Jika ada bukti kelancangan dan penghianatan (penipuan)

Dasar hukum tentang ini terdapat pada Al-quran surat Al-Anfaal ayat 58 yang berbunyi :

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 188

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”⁴⁹

Pembolehan pembatalan perjanjian karena kelancangan dan pengkhianatan terdapat pada kalimat “jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan ..., maka kembalikanlah perjanjian itu ...”. Maka perjanjian dapat dibatalkan apabila ada bukti kelancangan dan pengkhianatan.

Sementara itu, dalam ayat ini juga terdapat ketentuan dalam prosedur pembatalan perjanjian yakni perintah untuk mengembalikan perjanjian dengan cara yang jujur. Cara yang jujur dan baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan bahwa perjanjian akan dibatalkan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total. Hikmahnya adalah agar para pihak siap menerima ketentuan-ketentuan apabila perjanjian berakhir.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 184

B. Bagi Hasil dalam Islam (*Mudharabah*)

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya secara perseorangan untuk melakukan usaha-usaha. Namun, diantara usaha tersebut ada yang membutuhkan banyak modal, pikiran, dan tenaga.⁵⁰ Oleh karena itu, seorang muslim juga dianjurkan untuk bekerjasama dalam melakukan usaha agar hasilnya bernilai banyak.

Secara umum, kerjasama adalah bentuk tolong menolong yang diperintahkan dalam Islam selama kerjasama itu sesuai dengan syariat artinya tidak dalam bentuk dosa maupun permusuhan. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai jenis usaha, baik pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Kerjasama dapat terjadi antara pemilik modal dan pekerja, yang satu menyerahkan modal dan yang lain mengelola modal sehingga menghasilkan laba yang kemudian dibagi antara keduanya. Dalam Islam, kerjasama bagi hasil ini disebut *mudharabah*.

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya melakukan pekerjaan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan juga dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh* yang berarti potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungan.⁵¹

Mudharabah, *qiradh*, atau *muamalah* termasuk di antara bermacam-macam perserikatan. *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *Qiradh*

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: Muammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 2003), hlm. 377

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 205

adalah bahasa penduduk Hijaz. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Sedangkan *qiradh* berasal dari *al-qardh* yang berarti potongan. Penduduk Irak menamakan *qiradh* itu dengan *mudharabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.⁵²

Para fuqaha mengemukakan pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantaranya:⁵³

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* adalah akad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.
- b. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para *fuqaha'* tentang *mudharabah*, yakni: menurut para *fuqaha'*, *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan menyebut bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.
- c. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan *Mudharabah* yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian.
- d. Menurut Ulama Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba) karena

⁵² Syekh Muhammad bin Qasim, Terjemah Fat-Hul Qorib, Jilid I, (Surabaya: Hidayah, 1991)

⁵³ Rozalinda, *Op. Cit*, hlm 205-206

harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

- e. Menurut Malikiyah, *mudharabah* ialah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.
- f. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian keuntungan yang diketahui.
- g. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.⁵⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* ialah akad kerjasama antara pemilik harta (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*), dimana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengelola untuk diproduktifkan.⁵⁵ Kemudian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka resiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola. Namun jika kerugian itu disebabkan oleh pengelola, maka mereka harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut.⁵⁶

Para fuqaha dan sebagian sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerjasama antar dua pihak yaitu pihak pertama

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 135-137

⁵⁵ Rozalinda, *Op. Cit*, hlm 206

⁵⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 265

memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal.⁵⁷ Dengan demikian, maka kerjasama dalam model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat keinginan untuk bekerjasama di masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup.

Adapun definisi lain mengenai *mudharabah* yaitu merupakan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal (*shohibul mal*) memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha, namun dalam *mudharabah* pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen usaha dan untuk *mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *shahibul mal* modal beserta bagian keuntungannya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Mudharabah secara fikih disebut sebagai kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua. Mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek atau usaha mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya. Jika modal itu tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka pemilik modal tidak mendapat apa-apa selain modal tersebut. Begitu pula dengan pengusaha. Jika proyek rugi yang

⁵⁷ Rozalinda, *Op. Cit*, hlm 207

mengakibatkan hilangnya modal pokok karena kelalaian pengusaha, maka kerugian itu ditanggung oleh pengusaha.

Terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah* yaitu pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. *Shahibul mal* adalah orang yang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha, sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul mal*. Jadi keduanya harus saling memahami. Begitu pula *mudharib*, mengerti akan kemurahan hati *shahibul mal*. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerjasama yang saling membutuhkan dan dilakukan sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.⁵⁸

Sedangkan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak merupakan pemilik modal dan satu pihak lagi merupakan pengelola modal. Dengan keuntungan yang

⁵⁸ Muhammad, *Managemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26-28

⁵⁹ *Ibid.*

dibagi bersama sesuai kesepakatan. Apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut maka pemilik modal bertanggung jawab selama kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Umumnya, landasan hukum *mudharabah* dalam Islam lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti dalam kaidah fikih bahwa melakukan *mudharabah* atau *qiradh* hukumnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam Al-Quran tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang *mudharabah*, namun akad *mudharabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kerjasama dan perniagaan, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang manfaatnya lebih besar dari *mudharatnya*. Para ulama sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya mubah berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma', dan qiyas.

Dasar hukum *mudharabah* tercakup dalam surah Al-Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۖ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*⁶⁰

Dalam ayat tersebut, kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha atau bepergian meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari sebagian karunia Allah baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu.⁶¹

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198 dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : *“Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah*

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 575

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Cet 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 537

*kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu;
sekali pun sebelumnya kamu termasuk orang yang tidak tahu.”⁶²*



⁶² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 31

Senada dengan ayat di atas, dalam Surat Jumu'ah ayat 10 dijelaskan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya agar kamu beruntung.*”⁶³

Mencari karunia Allah sebagaimana yang tercantum pada ayat-ayat di atas dapat dilakukan dengan cara bekerja, baik bekerja dengan usaha seorang diri maupun bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk mudharabah.⁶⁴

Kalimat itu juga memberi atmosfer tawakkal kepada orang yang melakukannya bahwa ia sedang mencari karunia Allah ketika ia berusaha (dalam perniagaan), ketika mencari upah, dan mencari sebab-sebab rezeki kepada dirinya dan pekerjaannya. Ia hanya mencari karunia Allah dan Allah memberinya. Oleh karena itu, penting untuknya untuk tidak melupakan hakikat ia berusaha (berniaga) bahwa ia melakukan itu untuk mencari karunia Allah, sehingga ketika ia mendapat rezekinya melalui sebab-sebab itu, maka ia sedang beribadah kepada Allah.⁶⁵

Sementara dalam penggalan Surat Al-Maidah ayat 2:

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 554

⁶⁴ Rozalina, *Op. Cit*, hlm. 207

⁶⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Quran, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 235

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling menolong dalam bentuk kebaikan dan takwa, serta meninggalkan perbuatan dosa dan pelanggaran. Kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* adalah bentuk kerjasama tolong-menolong yang dibatasi oleh syariat sehingga kerjasama itu dibolehkan.

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* antara lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Shuhaib:

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَ فِئَهِنَّ
الْبَرْكَهٖ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shuhaib R.A bahwa Nabi bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majjah)⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma, t.th), hlm. 106

⁶⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyr Al Misyriyyah, t.th)

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan tiga perkara yang ke semuanya merupakan bentuk tolong-menolong demi memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ
مَالاً قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

“Dari Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya Usman Bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua.” (HR. Imam Malik)⁶⁸

Adapun landasan ijma’ ulama tentang kebolehan *mudharabah* ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *mudharabah*. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu akan berkembang.⁶⁹

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada *musaqah* yakni kerja antara pemilik sawah dengan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Sebab keduanya ada kesamaan yakni setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun belum diketahui berapa besarnya. *Musaqah* dan *qiradh* atau *mudharabah* keduanya diperbolehkan karena keperluan di mana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu, sementara

⁶⁸ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyr Al Misyriyyah, t.th)

⁶⁹ Rozalina, *Op. Cit*

orang yang bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. Makna ini ada pada *qiradh* sebab si pemodal terkadang tidak bisa menguruskan dengan baik dan yang bekerja tidak ada modal, maka yang pertama perlu tenaga kerja dan yang kedua perlu modal.⁷⁰



⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 246

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*.

Sedangkan rukun *mudharabah* menurut pandangan jumhur ulama ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'uqud alaih* (objek akad) yakni modal, kemudian usaha dan keuntungan, serta *shighat* (ijab dan qabul). Sementara menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, shighat, dan dua orang yang berakad.⁷¹

Ketika kalangan ahli fiqh meletakkan pekerjaan dan keuntungan sebagai bagian dari rukun akad *qiradh* atau *mudharabah*, padahal menurut kebiasaan keduanya belum ada kecuali setelah akad *qiradh* ini, maka keduanya harus disebutkan agar bisa terlihat hakikat *qiradh* yang sebenarnya. Jika tidak, maka ada orang yang melakukan akad *qiradh* namun tidak ada kerja dari pihak pekerja atau dia bekerja namun tidak ada keuntungan.⁷²

⁷¹ Rozalinda, *Op. Cit*, hlm. 208

⁷² Abdul Aziz, *Op. Cit*, hlm. 248

Berikut penjelasan rukun *mudharabah*:

1. Shighat

Shighat yaitu ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qiradh* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu. Akad *qiradh* atau *mudharabah* tidak bisa digantungkan dengan sesuatu karena ia akan batal dengan adanya *jahalah* seperti akad jual beli dan sewa. Juga tidak bisa ditentukan waktunya sebab ia akad tukar menukar secara mutlak bisa batal jika ada penentuan waktu seperti jual beli dan nikah.⁷³

2. Dua Pihak yang Berakad

Dua pihak yang berakad yaitu *Shahibul Maal* dan *Mudharib*. *Shahibul Maal* yaitu orang yang memiliki modal namun tidak punya kemampuan dalam segi waktu atau keterampilan untuk mengelolanya. Sehingga ia butuh partner kerja. *Mudharib* ialah orang yang bekerja dan mengelola harta milik *shahibul maal*, sebab ia mempunyai waktu dan keterampilan namun tidak memiliki modal. Atas dasar saling membutuhkan inilah keduanya kemudian bekerjasama dan membagi hasil atau keuntungannya.

3. Harta

Rukun *mudharabah* selanjutnya adalah harta. *Shahibul maal* harus menyertakan hartanya ketika akan melakukan akad *mudharabah*.

4. Pekerjaan

⁷³ *Ibid*

Tidak semua pekerjaan bisa untuk *qiradh*, yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan seperti perdagangan. Jika keuntungan didapat dengan cara menekuni keahlian seperti menumbuk, memasak, atau serupa itu, maka tidak sah sebab pekerjaan seperti ini pekerjaanya tidak disebut pedagang melainkan sebagai *properties*. Jika begitu, maka pekerjaan harus berupa perdagangan sebab *property* bisa menyewa orang lain. Dan jangan mempersempit gerak si pekerja dengan memberikan syarat, misalnya harus membeli tepung warna putih dan harus dijual pada waktu tertentu.⁷⁴

5. Keuntungan

Rukun yang kelima yakni keuntungan. Jika ada keuntungan dari *aqad qiradh* tersebut, maka keuntungan dibagi antara pemodal dan pekerja. Tidak dibolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil keuntungan karena hartanya dan pekerja mengambil keuntungan karena pekerjaannya. Dan jika ia memberi *qiradh* dengan syarat istri, anak, atau orang ketiga mendapat sebagian keuntungan, maka *qiradh* menjadi batal sebab dia memberi orang lain sesuatu tanpa jerih payah.⁷⁵

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat sah dalam rukun *mudharabah*, antara lain:

1. Dalam shighat *qiradh* atau *mudharabah*, tidak boleh ada syarat, misal harus jual beli setelah tempo tertentu. Jika terdapat syarat tersebut,

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 257

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 260

maka akad menjadi batal sebab syarat ini bertentangan dengan tujuan akad *qiradh*. Pekerja berhak melakukan proses jual beli untuk mencari keuntungan sedangkan syarat ini bisa menghambatnya, sehingga tidak sah. Berbeda dengan jika pemodal mensyaratkan tidak boleh membeli setelah tempo tertentu, maka syarat ini sah sebab pemodal memiliki wewenang untuk melarang membeli jika dia mau dan jika dia mensyaratkan larangan membeli maka dia telah memberikan syarat kepada sesuatu yang menjadi miliknya sesuai dengan tuntunan akad, maka tidak menghalangi sahnya akad.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa shighat harus bermakna *qiradh* atau bagi hasil. Pemodal tidak boleh memberikan syarat yang bisa menghambat pekerja dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba. Namun pemodal boleh melarang untuk membeli sesuatu dari hartanya tersebut sesuai dengan tuntunan akad.

Akad *mudharabah* dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan tentangnya. Tidak ada ucapan khusus yang harus diucapkan masing-masing pihak. Sehingga *mudharabah* dapat terjalin diantara mereka, dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Penjelasan ini didukung oleh kaidah fiqih yang berbunyi “*adat istiadat itu memiliki kekuatan hukum*”.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 249

Kaidah ini menyatakan bahwa praktik yang umum dan sering dilakukan di tengah masyarakat berlaku sebagai suatu dalil syariah. Seorang hakim dapat menyandarkan keputusannya pada kebiasaan atau tradisi di dalam masyarakat tersebut di samping dalil-dalil lain, dengan syarat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-sunnah.⁷⁷

2. Dua pihak yang berakad memiliki syarat, yang pertama, bagi pemodal sama dengan syarat yang memberi hak wakil dan bagi si pekerja sama dengan syarat menjadi wakil, sebab *qiradh* merupakan wakil dan perwakilan. Maka tidak boleh salah satunya lemah ingatan atau akal (idiot), bukan anak kecil, dan bukan orang gila.⁷⁸

Syarat kedua, ada izin secara mutlak, tidak boleh bagi si pemodal mempersempit ruang gerak pekerja. Misalnya tidak boleh membeli sebelum izin kepada pemodal, atau tidak boleh membeli kecuali warna putih, tidak boleh berinteraksi kecuali dengan si Fulan, dan lain-lain. hal ini sama saja mempersempit ruang gerak pekerja dan tidak bisa mewujudkan tujuan akad karena tujuan *qiradh* adalah keuntungan, jika ditentukan barang dan orangnya maka bisa jadi pekerja tidak mendapat keuntungan.

⁷⁷ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: UII Albaab, 2009), hlm. 101-103

⁷⁸ Abdul Aziz, *Op.Cit*, hlm. 249

Ketiga, si pekerja bebas bekerja agar ia bisa bekerja kapan saja dia mau dan yang dilarang dalam hal ini adalah pemodal ikut campur dalam pekerjaan si pekerja.⁷⁹

3. Harta dalam akad *qiradh* mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

As-Subki berpendapat bahwa syarat harta yang dijadikan modal dalam akad *qiradh* adalah bukan barang jualan yang berharga tetap atau taksiran, karena *qiradh* merupakan akad gharar yang tidak bisa dipastikan dan keuntungannya tidak dapat ditentukan. Jika bukan karena hajat maka tidak akan diperbolehkan, oleh sebab itu, ia hanya khusus dengan barang-barang yang laku menurut kebiasaannya, dan penjualan yang mudah adalah barang berharga berupa emas, perak, atau keduanya secara bersamaan.⁸⁰

Syarat kedua, harta yang dijadikan modal dalam akad *qiradh* hendaknya diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya. Tidak boleh berakad terhadap yang tidak diketahui jumlahnya untuk menghindari *jahalah* (ketidaktahuan) terhadap keuntungan, sehingga pekerja tahu berapa bagian yang akan menjadi miliknya dari keuntungan. As-Subki mengatakan sah akad *qiradh* terhadap barang yang tidak terlihat karena pada dasarnya ini sebguah perwakilan.⁸¹

Syarat yang ketiga adalah harta yang di-*qiradh*-kan diketahui oleh si pemilik, jika harta tidak diketahui seperti harta yang ada dalam

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 250-251

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 254-255

⁸¹ *Ibid*, hlm. 255

tanggungan baik si pekerja ataupun orang lain, maka akad tidak sah. Jika baru dijelaskan dalam majlis akad, maka akad menjadi rusak.

Syarat keempat, hendaknya harta diserahkan kepada pekerja dan dia bebas berbuat dan bertindak dengan harta tersebut agar tercapai tujuan *qiradh*. Dan apabila ada syarat yang diberikan pemilik modal kepada pekerja yang bertentangan dengan syarat keempat, maka dianggap tidak sah.⁸² Misalnya, si pemodal memberi syarat agar harta tersebut ada di tangannya atau di tangan orang lain, maka syarat ini bisa membatalkan akad *qiradh* sebab bisa jadi menghalangi pekerja untuk melakukan pekerjaannya.

4. Syarat pekerjaan dalam akad mudharabah yakni tidak ada keterangan yang pasti tentang bentuk pekerjaan yang harus dilakukan pekerja, maka bentuk pekerjaan disesuaikan dengan adat kebiasaan. Dan adat menetapkan bahwa pekerja melakukannya sendiri. Jika pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan berat, boleh baginya menyewa orang lain dan membayar upahnya dari harta *qiradh*, tapi jika ia melakukannya sendiri, dia tidak mendapat upah sebab ia melakukannya dengan sukarela.
5. Keuntungan mempunyai tiga syarat, yakni menjadi milik si pemodal dan si pekerja, diketahui jumlahnya, dan diketahui rincian bagiannya, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya.

⁸² *Ibid*, hlm. 256

Sedangkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang rukun dan syarat *mudharabah*, antara lain:⁸³

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad ialah cakap untuk berwakil, menerima wakil, dan tidak disyaratkan keduanya Muslim.
- b. Syarat terkait modal, yaitu 1) Berbentuk uang, seperti dirham, dinar, dan sejenisnya; 2) Modal harus diketahui jumlahnya; 3) Modal harus tunai tidak berupa utang; 4) Modal diserahkan kepada pekerja.
- c. Syarat yang terkait dengan laba, yakni 1) Laba diketahui jumlahnya; 2) Laba dibagi menurut ukuran tertentu sesuai dengan kesepakatan seperti sepertiga, seperempat, dan seperdua.

Ulama Hanafiyah mengemukakan untuk tercapainya akad *mudharabah* yang sah harus terpenuhi syarat-syarat berikut:⁸⁴

- a. Modal berbentuk mata uang, emas, atau perak yang dicetak secara resmi. Bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang, *mudharabah* tidak sah.
- b. Jumlah modal diketahui ketika akad sehingga modal yang diperdagangkan dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.
- c. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola maka tidak sah melakukan *mudharabah* dengan piutang pemodal yang ada pada pengelola.
- d. Keuntungan antara pekerja dan pemodal dibagi menurut ukuran yang jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat.

⁸³ Rozalinda, *Op.Cit.*, hlm. 208

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 208-209

- e. Bagian masing-masing diambil dari keuntungan bukan dari modal.

Ulama Malikiyah berpendapat, syarat sah *mudharabah* adalah:⁸⁵

- a. Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai apabila diserahkan secara cicilan maka akad batal.
- b. Modal diketahui ukurannya ketika akad dan bukan barang jaminan.
- c. Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara *mudharabah* atau tidak.
- d. Jelas ukuran pembagian laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sejenisnya.
- e. Salah seorang dari pihak-pihak tidak mengkhususkan suatu hal tertentu.
- f. Pihak yang bekerja hanya pekerja maka tidak sah disyaratkan berserikat dengan pemodal atau selain pemodal bersamanya.
- g. Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya maupun dalam hal batas waktu tertentu.

Sedangkan Syafiiyah berpendapat syarat sah *mudharabah* semuanya berkaitan dengan rukun *mudharabah*, yakni:⁸⁶

- a. Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.
- b. Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

- c. Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad. Pembagian keuntungannya jelas, misal seperdua, sepertiga, dan seterusnya.
- d. Syarat sah sighat yaitu ada ijab dan kabul yang jelas antara pemodal dan pekerja.
- e. Syarat yang berkaitan dengan modal antara lain, 1) modal terdiri dari mata uang yang resmi, 2) diketahui ukurannya dan jenisnya, 3) modal harus jelas maka tidak sah dikatakan “aku akan *memudharabahkan* kepada engkau satu dari kedua pundi itu”.

Kemudian menurut Hanabilah, syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada dalam tanggungan pemodal, berupa mata uang yang berlaku di daerah tersebut.
- b. Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas, separo, sepertiga, atau sejenisnya.

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.⁸⁸

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama bagi hasil di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 210

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 211

mengelola investasinya. Pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis agar tujuan *mudharabah* itu tercapai. Tidak ditentukan batas waktu, lokasi, maupun sector usaha. Namun tetap pada koridor Islam, misalnya tidak boleh digunakan dalam bisnis yang berkaitan dengan spekulasi, minuman keras, riba, dan lain sebagainya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana investasinya dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi cicilan tanpa jaminan, dan lain sebagainya. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat tersebut, maka pengelola dana bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk kerugian.

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya usaha, dengan pertimbangan dan kesepakatan pihak-pihak, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis ini adalah perpaduan antara *mudharabah* dan *musytarakah*.

5. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* mengandung pengertian panduan dan ketentuan dalam bagi hasil yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Dalam perjanjian ini, pemilik modal bersedia membiayai suatu proyek atau usaha dan pengelola setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Apabila usaha yang diawasi tersebut mengalami kerugian maka yang akan menanggung adalah pemilik modal selagi bukan dari kesalahan atau kelalaian pengelola.⁸⁹

Adapun prinsip pokok pembiayaan *mudharabah* yakni sebagai berikut:

1. Pelaku *Mudharabah*

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *Mudharabah*

Objek *Mudharabah* adalah konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *Mudharabah*.

a. Modal

- 1) Modal yang harus diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya yang dinilai sebesar nilai yang wajar dan harus jelas jumlah dan jenisnya.

⁸⁹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Ekonomi UII, 2004), hlm. 37

- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa ada setoran modal berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun. Padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran, kecuali atas seizin pemilik dana.
- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran, kecuali atas seizin pemilik dana.
- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaanya dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- 2) Kerja adalah hak pengelola dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

- 5) Jika pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, dan pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

c. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan keuntungan atas kerjanya dan pemilik dana mendapatkan keuntungan dari penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak berikut dengan cara pembagiannya. Jika memang dalam akad tidak disebutkan secara jelas, maka masing-masing mendapatkan 50% dan 50%.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyertakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut, maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola dana, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal;
2. Bila kerugian melebihi keuntungan maka setelah itu diambil dari pokok modal.

Adapun ketentuan tentang bagi hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut:⁹¹

Pasal 238 berbunyi:

- 1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul maal* adalah modal.
- 2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.

Pasal 239 yang berbunyi:

⁹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2011), hlm. 120

⁹¹ Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008*, Cet. I, (Jakarta: MA RI, 2013), hlm. 69-73

- 1) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan.
- 2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- 4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Adapun Pasal 240 yang berbunyi:

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam berbunyi:

- 1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad mudharabah.
- 2) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
- 3) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242 berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.

- 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243 menerangkan tentang hak pemilik modal, yakni:

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungannya berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan *mudharib* merugi.

Kemudian Pasal 244 yang berbunyi: *Mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerjasama dalam melaksanakan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Dalam Pasal 245 disebutkan bahwa *Mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246 tentang pembagian keuntungan berbunyi: (1) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran *shahibul maal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasari kesepakatan semua pihak.

Adapun Pasal 247 berbunyi: (1) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan kepada modal dari *shahibul maal*.

Kewajiban *Mudharib* menjaga aturan dan bertanggung jawab atas risiko kerugian maupun kerusakan, tertulis dalam Pasal 248 dan 249, yang berbunyi:

1. *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
2. *Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Berakhirnya akad *mudharabah* diterangkan dalam Pasal 250 yang berbunyi: (1) Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Dalam Pasal 251 diterangkan tentang cara penyelesaian akad apabila terjadi perselisihan, butir-butir dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- 3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan shulh dan atau melalui pengadilan.

Dalam Pasal 252 juga diterangkan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.

Kemudian dalam Pasal 253 berbunyi: (1) Akad *mudharabah* akan berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dan Pasal 254 menerangkan bahwa:

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.

Berdasarkan uraian ketentuan dalam prinsip-prinsip *mudharabah* di atas, maka hendaknya pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* mematuhi rambu-rambu yang ada sehingga pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil sesuai dengan syariat Islam.

6. Berakhirnya *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:⁹²

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

Menurut Sayid Sabiq, apabila pengelola atau pemilik modal meninggal dunia, menurut jumhur ulama *mudharabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena dalam akad *mudharabah* ada unsur *wakalah*, bila orang yang mewakilkan atau menerima wakil meninggal maka *wakalah*

⁹² Rozalinda, *Op.Cit*, hlm. 217

tidak bisa dilanjutkan sehingga batal. Sementara menurut Malikiyah, akad *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Apabila yang meninggal itu *mudharib*, maka ahli warisnya dapat menggantikan dan melanjutkan usaha tersebut jika ia dapat dipercaya.

- d. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan *mudharib*, maka akad *mudharabah* menjadi batal.
- e. Akad *mudharabah* batal ketika *shahibul maal* atau *mudharib* murtad, kemudian meninggal dunia. Atau dihukum mati karena murtadnya.
- f. Tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah.
- g. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha, misalnya pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketentuan *mudharabah*. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya atau ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini, pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
- h. Menurut Sayid Sabiq, jika pemilik modal meninggal dunia maka *mudharabah* menjadi *fasakh*. Dan jika telah *fasakh* maka tidak ada hak bagi pengelola untuk menggunakan modal. Dan jika ia bertindak

menggunakan modal setelah ia mengetahui bahwa pemilik modal meninggal dunia dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai ghasab (merampas) dan dia wajib menjaminnya.

- i. Apabila modal itu menguntungkan, maka keuntungan dibagi dua. Namun ketika *mudharabah* batal sedangkan modal berbentuk barang dagangan, maka pemilik modal dan pelaksana menjual atau membaginya, karena itu merupakan hak berdua. Jika pelaksana setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik dipaksa menjualnya karena pengelola (*mudharib*) punya hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya. Demikian menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali.⁹³

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad batal karena beberapa faktor, yakni:⁹⁴

- a. Modal yang diberikan habis atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang *aqid* meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad wakalah. Di samping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut Malikiyah, akad *mudharabah* bisa diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad hilang kecakapan bertindak hukum, seperti gila.

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 13*, (Bandung: Ma'arif, 1987), hlm. 36-37

⁹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177

- d. Pemilik modal murtad. Jika demikian, menurut Imam Hanifah akad *mudharabah* menjadi batal.
- e. Modal dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

7. Hikmah *Mudharabah*

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial; membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta (*habluminallah*), manusia juga diharuskan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia (*habluminannas*). Dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia, hendaklah mereka saling menolong dan memberi kemudahan dalam hal kebaikan yang dibenarkan syariat. Salah satu bentuk tolong-menolong itu adalah kerjasama bagi hasil atau *mudharabah*, baik dalam bidang perniagaan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

Sebab sewaktu-waktu ada pihak yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk mengelola harta tersebut. Sementara satu pihak ada yang memiliki kemampuan (*skill*) untuk mengelola namun tidak memiliki harta atau modal. Dengan adanya dua jenis orang semacam ini, diharapkan dapat saling menolong dan melengkapi satu sama lain dalam mengembangkan harta dan kemampuan tersebut. Sehingga tujuan dari kerjasama itu tercapai, salah satunya meningkatkan taraf hidup.

Mudharabah atau *Qiradh* bermakna saling menolong, pemilik harta (*shahibul maal*) memberi kemudahan bagi urusan mereka, serta memberi

jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan. Jika Islam menganjurkan orang yang meng-*qiradh*-kan, maka sesungguhnya Islam juga memperbolehkan untuk orang yang menerima harta atau modal (*mudharib*) untuk mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena ia mengambil atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhannya dan kemudian ia mengembalikan harta seperti sediakala.⁹⁵ Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Mudharabah atau *Qiradh* diperbolehkan untuk memudahkan orang melakukan usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhannya, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan sebagian lagi ada yang tidak memiliki harta namun punya tenaga, waktu, dan keahlian untuk mengembangkan harta tersebut. Keduanya dapat mengambil manfaat dari kerjasama itu, untuk itulah hasil atau keuntungan dari usaha-usaha pengembangan harta itu dibagi antara mereka dengan kesepakatan bersama.

Hingga saat ini, praktik kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor. *Mudharabah* telah memupuk jiwa gotong royong dan sifat tolong menolong di tengah masyarakat. Dan hikmah yang dikehendaki Allah SWT dalam praktik *mudharabah* tentu saja untuk menjalin kasih sayang antar manusia dan menghilangkan kefakiran menuju kesejahteraan hidup bersama.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, (Bandung: Ma'arif, 1993), hlm. 129

C. Teori Tentang Royalti

Hubungan kerjasama antara penulis dan penerbit dalam dunia penerbitan buku tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan dalam melakukan kerjasama penerbitan buku. Selain penulis dan penerbit, terdapat pula editor, percetakan, distributor, toko buku, dan agen sastra yang merupakan mata rantai dalam industri penerbitan buku. Keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama itu kemudian dibagi menurut kontrak kerjasama yang sudah disepakati sejak awal. Bagian keuntungan yang diterima penulis dan penerbit disebut honorarium atau royalti.

Penulis dan pengarang adalah istilah yang digunakan bergantian dalam dunia penerbitan. Pengarang adalah orang yang mengarang tentang gagasan atau ide-idenya baik di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk naskah atau buku, gambar atau peta, maupun daftar. Sedangkan penulis adalah orang yang menulis. Menulis berarti proses desain. Oleh karena itu, menulis memerlukan cara berpikir desain yang tidak linear, akan tetapi cara berpikir horizontal yaitu cara berpikir yang membuka selebar-lebarnya berbagai kemungkinan bagi suatu masalah yang ingin dipecahkan, tidak justru berhenti dan puas dengan sebuah solusi. Untuk itu menulis tidak hanya menyampaikan ide, gagasan, atau pesan tertentu dan bagaimana orang dapat memahami ide dan gagasan itu, tetapi jauh lebih luas lagi, bagaimana orang dibuat tertarik bahkan terpengaruh oleh sebuah tulisan.⁹⁶

⁹⁶ Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 28

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pengarang dan penulis tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Pengarang dan penulis sama-sama menghasilkan buah pikiran dalam bentuk tulisan. Menurut *S. Sahala Tua Saragih*, dalam dunia penulisan modern dikenal beberapa karya tulis, antara lain karya tulis kesusastraan, karya tulis ilmiah, pengetahuan umum, sejarah, dan karya tulis jurnanisme.⁹⁷

Terlepas dari jenis karya yang dihasilkan penulis atau pengarang, negara memberikan perlindungan hukum dan hak kepada penulis dan pengarang yang bersangkutan, dalam hal mengumumkan dan menyebarluaskan karyanya kepada masyarakat. Dalam hal memperbanyak hasil karya berupa buku, umumnya penulis atau pengarang memercayakannya kepada penerbit melalui perjanjian penerbitan. Dalam perjanjian itulah kemudian dikemukakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak menerima honor atau royalti dari hasil karya (buku) yang terjual.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku, dikemukakan: “Penerbit buku yang selanjutnya disebut penerbit adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menerbitkan buku.”⁹⁸

Hasan Pambudi, memberikan definisi penerbit yakni menerbitkan berarti mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada khalayak ramai, kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh percetakan. Sementara itu

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 29

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 21

Datus C. Smith Jr. mengemukakan bahwa penerbit adalah pusat dalam segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lain dalam industri buku. Kemudian dalam Kamus Leksikan Grafika menjelaskan bahwa penerbit adalah orang yang berusaha mengeluarkan naskah sebagai barang cetakan jadi untuk disebarluaskan.⁹⁹

Maka dari pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa penerbitan buku adalah suatu usaha atau bisnis yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha khusus yang kemudian disebut penerbit. Tugasnya yakni mengordinir, mengusahakan, dan mengelola naskah dari pengarang atau penulis, menjadi barang cetakan jadi yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Adanya hubungan saling membutuhkan antara penulis dan penerbit inilah yang kemudian menjadi hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama dari hasil penjualan buku dan keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal. Bagian keuntungan yang diterima penulis kemudian disebut royalti.

1. Pengertian Royalti

Menulis buku adalah sebuah proses kreatif yang panjang dan tidak mudah, sama halnya dengan proses membuat lagu, kreografi tari, film, dan lain-lain. Kegiatan menulis, terutama kesusatraan sudah banyak digeluti, bahkan geliat menulis dan membaca sebuah karya sastra sudah ada sejak dulu. Sebut saja

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 21-22

karya-karya Pramoedya Ananta Toer, Chairil Anwar, dan lain-lain sejak dulu karya-karyanya sudah digandrungi bahkan hingga saat ini.

Dalam proses menulis buku sampai akhirnya bisa dinikmati para pembaca, buku tersebut harus melalui beberapa proses, antara lain proses penulisan, penerbitan, dan percetakan. Seperti halnya profesi lain, profesi sebagai penulis pun patut menerima imbalan atau keuntungan atas perjuangannya dalam menghasilkan suatu karya berupa buku. Imbalan atau bagian keuntungan tersebut disebut sebagai royalti atau honorarium penulis buku.

Dewasa ini royalti penulis buku begitu intens dibahas oleh berbagai kalangan, terutama penulis dan penerbit. Wajar saja jika royalti menjadi bahasan yang menarik karena saat ini profesi sebagai penulis mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut tampak dari banyaknya judul-judul buku baru dan munculnya penulis-penulis muda yang menerbitkan buku berbagai jenis dan *genre*. Selain itu, geliat kepenulisan dapat dilihat dari munculnya pelatihan-pelatihan menulis dan lomba menulis. Baik menulis sastra maupun menulis karya ilmiah.

Menurut Kamus Hukum, Royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual.¹⁰⁰ Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁰¹

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 511.

¹⁰¹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara umum, royalti adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada Pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.¹⁰² Jumlah royalti biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.¹⁰³

berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa royalti penulis buku adalah bagian keuntungan berdasarkan persentase yang diberikan oleh pengguna hak cipta yakni penerbit, kepada Pencipta atau pemegang hak terkait yakni penulis atau ahli waris yang memegang hak cipta secara sah apabila penulis sudah meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Royalti

Secara khusus tidak ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang besarnya royalti yang harus diberikan penerbit kepada penulis. Sebelum membahas lebih lanjut royalti, ada baiknya peneliti lebih dulu memaparkan pengertian Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁴

¹⁰² Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 165

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Edisi Revisi. Cetakan 6*, (Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 235

Pengertian Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta terbaru dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian sebagai berikut :

Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁰⁶

Terdapat perbedaan antara Pencipta dengan Pemegang Hak Cipta. Pada diri Pencipta melekat hak moral dan hak ekonomi atas Ciptaan tersebut, sedangkan pada Pemegang Hak Cipta hanya terdapat hak ekonomi. Hak moral pada Pencipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta.¹⁰⁷ Pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang memperoleh hak secara sah dari Pencipta.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Ekonomi dan Hak moral adalah sebagai berikut:

Hak Ekonomi (*economic rights*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak Moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat

¹⁰⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰⁷ Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dihilangkan atau dihapus dalam keadaan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum hak moral mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian pencipta juga dapat mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau perubahan lain dalam karya ciptanya.¹⁰⁸

Dengan adanya hak ekonomi, maka Pencipta atau Pemegang hak cipta akan mendapat imbalan ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain, baik pemanfaatan berupa memperbanyak ataupun berupa mengumumkan.

Hal inilah yang menyebabkan timbul pemikiran bahwa kegiatan “mencipta” dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogyanya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, maka hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.¹⁰⁹

Kaitannya dengan skripsi ini adalah dalam hal penerbitan buku, penulis adalah pencipta dan penerbit adalah pemegang hak cipta. Penulis memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut, sedangkan penerbit hanya memiliki hak ekonomi. Oleh sebab penulis dan penerbit sama-sama memiliki hak ekonomi, maka keduanya berhak mendapat bagian keuntungan dari penjualan buku tersebut.

Penulis memiliki tanggung jawab terhadap isi atau konten dari suatu karangan serta berhak mendapat keuntungan dari hasil karya ciptanya

¹⁰⁸ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis, Edisi 1, Cetakan 1*, (Jakarta-Bandung: Badan Penerbit FHUI & Penerbit PT Alumni, 2011), hlm. 120

¹⁰⁹ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 93

tersebut, keuntungan yang dapat penulis peroleh salah satunya berupa royalti. Sementara Penerbit hanya memiliki hak untuk menerbitkan, mengumumkan dan memperbanyak karya cipta, serta melakukan hal-hal yang sifatnya komersil tanpa mengubah substansi dari isi karangan. Bagian keuntungan penerbit juga diambil dari keuntungan penjualan buku.

3. Macam-Macam Royalti Penulis

Bagi penulis atau pengarang pemula, besaran royalti bukan suatu masalah. Namun bagi penulis profesional yang menggantung hidup dari menulis, besarnya royalti adalah hal yang sangat penting, sebut saja Tere Liye, Dee Lestari, dan Asma Nadia. Mereka adalah sebagian penulis yang menjadikan kegiatan ‘mencipta’, menulis, atau mengarang sebagai pekerjaan utamanya. Ini terlihat dari betapa produktifnya mereka membuat karya. Bagi pengarang yang sudah profesional, kebutuhan hidup pengarang yang bersangkutan digantungkan kepada honorarium hasil karangannya. Persoalan perjanjian penerbitan buku perlu dipikirkan secara matang, sebab hal ini menyangkut masalah hak warisan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perjanjian honorarium perlu dibuat secara tertulis.¹¹⁰

Dalam diskusi-diskusi sering muncul pertanyaan, honorarium atau royalti untuk penulis sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh penerbit dan toko buku. Untuk penulis, honor yang diberikan berkisar 5-15%. Sedangkan jika dibandingkan dengan misalnya potongan yang diterima oleh toko buku yang berkisar di angka 25-45%. Jika demikian,

¹¹⁰ Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), hlm. 3

maka timbul pertanyaan, jasa siapa sebenarnya yang paling besar dalam menghasilkan suatu karya berupa buku sehingga bisa sampai di tangan pembaca.¹¹¹

Menurut Firdaus Umar dari Penerbit Mutiara Sumber Widya Jakarta dan Angkasa Bandung: “Tiras buku yang kecil menjadi penyebab rendahnya royalti yang diterima para penulis buku. Hal ini berdampak pada kurangnya minat para intelektual Indonesia untuk menulis buku. Tiras buku umumnya adalah 3.000 eksemplar. Untuk buku yang bagus, buku-buku itu baru habis setelah enam bulan. Penerbit rata-rata memberikan royalti 10% persen bruto dikurangi pajak penghasilan. Lebih lanjut dikemukakan, selama ini penerbit rata-rata menerbitkan 3.000 buku per judul. Kecilnya royalti dan tiras itulah yang seringkali menyurutkan niat para penulis untuk membuat buku. Dan, untuk sejumlah penerbit, kini lebih baik mengalihkan penerbitan pada buku agama atau buku terjemahan.”¹¹²

Senada dengan pendapat di atas, Muhidin M. Dahlan sebagai pemangku kepentingan dalam bidang perbukuan, mengungkapkan: “Profesi penulis tampak mewah dan cemerlang karena ia menjadi manusia terpilih yang tiap saat bergelut dengan idealisme dan kreatifitas. Namun, hanya sedikit yang nasibnya berkilau. Menulis buku itu, apalagi yang serius, memang melelahkan. Karena beratnya penanggungan ini, orang lebih memilih menulis makalah seminar ketimbang meniatkan diri menulis buku yang asli buku.”

Oleh karena itu, pembagian keuntungan berupa royalti atau honorarium penulis buku menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan baik dilihat dari sudut pandang penulis maupun penerbit.

Secara umum, royalti atau honorarium penulis buku diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sistem Persentase

Dalam sistem ini penulis mendapatkan honorarium atau royalti dari penerbit sekian persen dari harga neto yang telah terjual. Pada umumnya

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 56

¹¹² *Ibid*, hlm. 58

untuk karangan asli berkisar antara 10%-20%. Untuk terjemahan atau penghimpunan berkisar 10%-17,5% per buku.¹¹³

Misalnya, Si A menerbitkan buku X dengan harga jual per buku Rp1.000 (seribu rupiah), maka harga netonya dikurangi sekitar 30%-40% untuk distributor dan toko buku, maka perhitungan honorinya yakni sebagai berikut: Harga jual per buku Rp1.000,-. Harga netto per buku = $40\% \times \text{Rp}1.000,- = \text{Rp}600,-$. Honor penulis yakni $20\% \times \text{Rp}600,- = \text{Rp}120,-$. Adapula yang menggunakan hitungan berbeda, misalnya, royalti penulis sebesar 10%, maka perhitungan royaltinya adalah $10\% \times \text{Rp}1.000 = \text{Rp}100,-$ per buku.

Jadi honor penulis per buku yang laku adalah sebesar Rp120,- (seratus dua puluh rupiah) atau Rp100,-. Biasanya pembayaran honor dilakukan setahun sekali tergantung perjanjian antara dua belah pihak.¹¹⁴

Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah jumlah Rp120,- tersebut sudah penuh diterima oleh penulis? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak, sebab dengan berlakunya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, maka uang jasa yang diterima oleh seseorang honorarium atau royalti dari hasil karyanya dikenakan pajak penghasilan yang berkisar 15%-20%. Pemotongan pajak tersebut menurut ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Pajak dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini dilakukan oleh penerbit.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 59

¹¹⁴ *Ibid*

Jadi kalau dipotong pajak penghasilan atas honorarium atau royalti di atas, maka jumlah bersih yang diterima pengarang yakni Rp120,- dikurangi dengan pajak penghasilan ($15\% \times \text{Rp}120,-$), maka honor bersihnya adalah Rp112,-(seratus dua belas rupiah per buku).

Keuntungan dari sistem ini adalah penulis mengetahui berapa eksemplar bukunya terjual. Bagi penerbit, keuntungannya adalah tidak terlalu banyak mengeluarkan uang tunai karena honor tidak dibayar sekaligus. Namun, kerugian bagi penulis yakni tidak bisa memperoleh honorarium sekaligus.

b. Sistem Termin

Dalam sistem termin pembayaran honorarium atau royalti kepada penulis tidak digantungkan pada laku tidaknya buku, melainkan sudah ditentukan jangka waktu pembayarannya. Misalnya setelah buku terbit, honor akan dibayar sebanyak 40% (tergantung kesepakatan) dari nilai buku secara keseluruhan, sisanya dibayar 6 bulan atau setahun kemudian.¹¹⁵

Keuntungan dalam sistem ini adalah penulis lebih cepat menikmati haknya. Namun kerugiannya, penulis tidak tahu berapa eksemplar bukunya laku. Kerugiannya bagi penerbit yakni apabila buku tidak laku maka banyak modal yang mati. Oleh karena itu, sistem ini hanya menguntungkan bagi buku-buku yang pengarangnya sudah dikenal masyarakat dan memiliki mangsa pasar yang besar.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 60

c. Sistem Bagi Hasil Berupa Buku

Dalam sistem bagi hasil penulis mendapat honorarium bukan berupa uang, melainkan sejumlah buku dari yang dicetak. Misalnya penulis mendapat 20% dari 5.000 eksemplar, maka yang didapat penulis adalah 1.000 eksemplar buku.

Untuk sistem ini, jarang dipraktikkan. Sebab, dengan sistem ini kerugian lebih banyak diterima oleh penerbit, terlebih jika buku tersebut bukan termasuk *best seller*. Sedangkan bagi penulis, bisa saja ia menjual buku tersebut dengan cara *door to door* ataupun menjual dengan harga lebih rendah dari penerbit, maka hal ini bisa menjadi *boomerang* bagi penerbit itu sendiri.

d. Sistem Lepas atau Penjualan Hak Cipta

Dalam sistem ini penulis menjual hak ciptanya kepada penerbit sehingga penulis tidak terlalu lama menunggu honorariumnya seperti dalam sistem-sistem sebelumnya. Misalnya, ketika penulis telah menyelesaikan naskah, maka naskah tersebut dibeli oleh penerbit dengan harga yang disepakati bersama.

Namun harus disadari bahwa risiko yang dihadapi cukup tinggi baik bagi penerbit maupun penulis. Risiko bagi penerbit yakni jika buku tidak laku maka penerbit akan menderita kerugian karena honorarium penulis sudah diberikan di awal. Bagi penulis, apabila buku tidak laku maka penulis sudah mendapat keuntungan dari penjualan naskah tersebut.

Namun jika buku laku dalam jumlah besar, bahkan melebihi yang diterima penulis atau pengarang, maka pengarang tidak bisa mendapat honor lagi.

Menurut Sentosa Sembiring, risiko kerugian lebih banyak ditanggung oleh penerbit. Sebab, sukar menilai apakah buku tersebut akan laku atau tidak, sedangkan bagi penulis mungkin saja dapat mengarang buku yang hampir sama dengan buku yang dijual hak ciptanya.¹¹⁶

Sistem jual-lepas atau pembelian hak cipta pengarang dalam tahun-tahun terakhir ini mulai dipelopori oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional RI. Sistem ini dilakukan lewat program pengadaan Buku Secara Elektronik (BSE) dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.¹¹⁷

Kemudian saat ini, sistem jual-lepas atau penjualan hak cipta banyak ditemui dalam praktik yakni untuk buku-buku terjemahan ataupun saduran, penerbit biasanya membayar penerjemah, baik itu berdasarkan kontrak kerja maupun penerjemah lepas.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 61

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 61-62

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Aura Publishing

1. Sejarah Berdirinya Aura Publishing

CV. Anugrah Utama Raharja atau yang disingkat AURA adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha penerbitan dan percetakan. Perusahaan ini berdiri sejak Desember 2012. Pada mulanya, AURA bergerak di bidang *Digital Copyer* buku, modul, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA) berkembang dan melakukan banyak perluasan bidang layanan. Di antaranya, membuka penerbitan buku dan juga jasa percetakan buku sebagai unit bisnis yang dikelola secara profesional untuk melayani jasa percetakan buku maupun penerbitan buku.¹¹⁸

Aura Publishing terletak di Jalan Soemantri Brojonegoro, Jalur Dua Unila Gedongmeneng, Rajabasa, Bandar Lampung. Aura Publishing memiliki satu gedung utama sebagai kantor administrasi dan sekaligus kantor percetakan.

Aura Publishing memiliki izin usaha dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan di bidang penerbitan buku, barang hasil cetakan, ATK Komputer, jasa percetakan, jasa fotocopy, konveksi dan sablon.¹¹⁹ Dengan adanya izin tersebut, maka Aura Publishing memiliki kekuatan hukum untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

¹¹⁸ Aura Publishing, *Company Profile*, (Bandarlampung: Aura Publishing, tth), hlm. 2

¹¹⁹ Surat izin terlampir.

Aura Publishing memiliki struktur kepemimpinan dalam menjalankan perusahaannya, yakni:

a. Pemimpin Bisnis atau Direktur

Pemimpin Bisnis adalah orang yang memimpin perusahaan. Ikhsanuddin, M.M. atau yang akrab dipanggil Mas Ikhsan adalah Pemimpin atau Direktur Aura Publishing. Ia seorang pengusaha muda yang telah teruji kemampuannya. Dengan target, semangat, dan jiwa kepemimpinannya ia ingin membawa perusahaan menjadi *profitable*, progresif, dan inovatif. Seorang pemimpin bisnis harus memiliki wawasan dan pergaulan yang luas, dengan begitu ia dapat menjalin hubungan baik dengan banyak pihak dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan, serta mengembangkan perusahaan, dalam hal ini Aura Publishing, sehingga dikenal dan dapat diperhitungkan sebagai percetakan dan penerbitan yang unggul di Lampung.¹²⁰

b. Tim Editor

Tim Editor Aura Publishing beranggotakan beberapa editor. Tim Editor bekerja sebagai penyunting naskah yang professional sehingga dapat dipastikan bahwa naskah buku ajar dan buku referensi atau buku umum lainnya layak terbit dan layak cetak. Namun sebelumnya, naskah yang masuk akan diklasifikasikan menjadi dua tipe utama yaitu, perlu diedit dan tidak perlu diedit. Tentunya naskah-naskah yang sudah diklasifikasikan

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 3

tersebut sudah melalui persetujuan penulis, apakah penulis menghendaki naskahnya diedit atau tidak.¹²¹

c. Tim Desain Grafis

Desain Grafis berfungsi untuk membuat desain dan *layout* buku yang kreatif sehingga tampilan buku tersebut terlihat menarik.¹²²

Aura Publishing memiliki beberapa produk dan layanan, antara lain:¹²³

- a. Pra-cetak, yaitu layanan berupa editing, desain dan layout buku, dengan pengerjaan yang cepat dan hasil yang professional, desain cover buku yang *eye-catching* sebagai bagian dari penyajian kemasan buku yang menarik.
- b. Layanan Cetak Buku (*Printing*), yaitu pemberian layanan cetak berbagai jenis dan ukuran buku, dari cetak satuan hingga ribuan. Dengan mesin cetak buku teknologi terkini, hasil yang diperoleh akan memiliki kualitas terbaik dan dengan harga yang kompetitif.
- c. Layanan Penerbitan (*Publishing*), yaitu pemberian layanan penerbitan yang dapat dipercaya, dengan harapan karya berupa buku siap untuk dipasarkan ke masyarakat sesuai idealism dari penulis dengan kualitas yang layak dan bagus. Satu keuntungan lagi bahwa Aura Publishing adalah salah satu anggota IKAPI, sehingga buku yang diterbitkan sesudah diakui oleh konsorsium sebagai buku profesional yang layak dikonsumsi publik.

¹²¹ *Ibid*

¹²² Wawancara Tim Desain Grafis Aura Publishing, Januari 2018

¹²³ Aura Publishing, *Company Profile*, (Bandarlampung: Aura Publishing, tth), hlm. 5

d. Kerjasama Penerbitan Perguruan Tinggi. *University Press* mempunyai peran sebagai Penyangga Utama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Atas dasar semangat tersebut, Aura publishing membentuk sebuah divisi yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam mendirikan penerbitan perguruan tinggi (*University Press*) bagi universitas atau perguruan tinggi yang belum memilikinya. Dengan tujuan antara lain agar para akademisi lebih aktif dalam menyebarkan gagasan dan pemikiran mereka untuk dibaca oleh khalayak ramai. Salah satu caranya ialah dengan menyusun, menulis, dan mencetak gagasan dan pemikiran tersebut ke dalam bentuk buku ilmiah, buku ajar, buku teks, monograf, jurnal, dan sebagainya.

Beberapa universitas yang sudah menjalin kerjasama ini antara lain, Universitas Lampung, UIN Raden Intan Lampung, IAIN Jurai Siwo, IBI Darmajaya, Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Bandar Lampung, Universitas Batu Raja, Sekolah Global Madani Bandar Lampung, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dan masih banyak lagi.

2. Visi dan Misi Aura Publishing

Visi dan Misi Aura Publishing antara lain¹²⁴:

VISI : Menjadi penerbit buku terbesar dan terbaik di Provinsi Lampung khususnya, dan mampu bersaing di tingkat nasional.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 6

- MISI :**
1. Menyelenggarakan usaha penerbitan dan percetakan secara professional dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kehidupan yang sejahtera.
 2. Menyediakan buku-buku pendidikan dan umum yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat.
 3. Melayani kebutuhan solusi dokumen masyarakat dengan kualitas prima.

3. Macam-macam Sistem Penerbitan pada Aura Publishing

Sampai saat ini sudah puluhan penulis asal Lampung maupun Nasional yang menerbitkan karyanya lewat Aura Publishing, baik berupa buku non-fiksi, fiksi, buku ajar, penelitian, dan lain sebagainya dengan memakai sistem penerbitan yang ada.

Berikut dua sistem penerbitan yang ada pada Aura Publishing :

a. Sistem Penerbitan Indie (*Self Publishing*)

Sistem penerbitan indie adalah sistem penerbitan di mana penerbit hanya menjadi wadah untuk menerbitkan dan mencetak karya penulis menjadi sebuah buku yang siap dijual. Penulis hanya perlu membayar penerbit sesuai dengan biaya cetak yang ditetapkan penerbit. Untuk harga dan penjualan buku, sepenuhnya ditanggung penulis.¹²⁵

Dengan demikian, alur dalam sistem penerbitan indie adalah Penulis mengirimkan naskahnya kepada Aura Publishing dengan memilih paket penerbitan yang ada di sistem penerbitan indie (*self-publishing*).

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 7

Saat ini untuk layanan *self-publishing*, Aura Publishing hanya menyediakan Paket Populer dengan biaya Rp. 2.000.000. Adapun fasilitas yang disediakan adalah sebagai berikut¹²⁶:

- 1) ISBN (*International Standard Book Number*)
- 2) *Design cover* dan *layout* kualitas prima sesuai keinginan penulis
- 3) 2 kali *proofing design cover* dan penulis berhak melakukan revisi dua kali
- 4) Cetak kualitas prima dengan mesin *printing* POD (*Print On Demand*) canggih. Bahan cover *ivory* 210gr, *Finishing Laminating doff*, isi HVS 70gr
- 5) 50 exp untuk ukuran buku A5 (21×14 cm), maksimal 100 halaman, jika lebih dari 100 halaman akan dikenakan penambahan biaya
- 6) 50 exp untuk ukuran buku UNESCO (15,5 x 23cm), maksimal 100 halaman, jika lebih dari 100 halaman akan dikenakan penambahan biaya. Ongkos kirim ditanggung penulis.
- 7) Terbit dalam 7 hari kerja
- 8) Promo di *website* Aura Publishing
- 9) Edit aksara dan EYD (penambahan biaya maksimal 200 halaman Rp.300.000,-).

Kemudian naskah tersebut akan dikategorikan perlu diedit atau tidak perlu diedit. Jika perlu, maka pihak Aura akan meminta persetujuan dari penulis. Setelah proses editing selesai, maka Aura akan mengurus proses

¹²⁶ Dikutip dari website www.aura-publishing.com pada Januari 2018

penerbitan dan percetakan sesuai paket yang dipilih oleh penerbit. Setelah proses penerbitan dan percetakan selesai, Aura Publishing tidak memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan ataupun menjual buku tersebut. Namun, pihak Aura akan membantu proses promosi sesuai kebijakan yang mereka buat¹²⁷.

Keuntungan jika menggunakan sistem ini ialah penulis dapat menentukan harga dan mengambil keuntungan lebih karena penulis menjualnya dengan cara *door to door*. Namun kelemahannya ialah penulis harus pintar-pintar mengatur strategi agar buku tersebut laku karena penulis harus menjual sendiri bukunya, tidak bisa memakai jasa distributor seperti toko-toko buku. Namun dalam praktiknya, Aura Publishing dapat membantu promosi dan penjualan dengan pembagian keuntungan sebesar 20% dari harga jual setiap buku untuk Aura Publishing.

b. Sistem Penerbitan Mayor (*Mayor Publishing*)

Berbanding terbalik dengan Sistem Penerbitan Indie, Sistem Penerbitan Mayor adalah sistem penerbitan di mana penulis hanya perlu mengirim naskahnya kepada penerbit, kemudian semua biaya ditanggung oleh penerbit. Mulai dari biaya terbit, biaya cetak, kertas, distributor, promosi, dan lain sebagainya. Penerbit akan mencetak dan menerbitkan buku dalam jumlah besar, biasanya di atas 1000 eksemplar. Penulis hanya perlu menunggu royalti dari hasil penjualan buku tersebut.¹²⁸

¹²⁷ Wawancara dengan Ikhsanuddin, Pimpinan Aura Publishing, Januari 2018

¹²⁸ *Ibid.*

Adapun kriteria naskah yang bisa diterbitkan dengan sistem mayor pada Aura Publishing adalah sebagai berikut:¹²⁹

- 1) Fiksi/nonfiksi untuk kelompok pembaca dewasa, remaja, dan anak-anak. *Based on true story* lebih disukai.
- 2) Karya asli, bukan jiplakan. Bila berbentuk saduran atau terjemahan, cantumkan sumber aslinya dalam naskah.
- 3) Tidak sedang atau belum pernah diterbitkan oleh penerbit lain. Bila sudah pernah terbit, sertakan bukti kontrak yang menunjukkan bahwa perjanjian penerbitan sudah selesai/kadaluwarsa.
- 4) Tema menarik, *up to date*, unik, & dibutuhkan pembaca masa kini.
- 5) Tidak mengandung unsur pornografi.
- 6) Tidak berpotensi menimbulkan/memicu konflik SARA.

Adapun format naskahnya sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Naskah diketik dalam format ukuran kertas A4 dengan spasi 2, Margin Top 3, Left 3, Right 3, Bottom 3 (dalam cm)
- 2) Jenis font Times New Roman, ukuran font 12pt
- 3) Panjang naskah maksimal 200 halaman untuk fiksi/nonfiksi pembaca dewasa; minimal 100 dan maksimal 225 halaman untuk fiksi/nonfiksi remaja; 60 halaman untuk naskah buku anak-anak

¹²⁹ Dikutip dari website www.aura-publishing.com pada Januari 2018

¹³⁰ *Ibid*

- 4) Tuliskan di judul email Kirim Naskah, diikuti dengan jenis naskah, kategori pembaca atau lini. Misal :

KIRIM NASKAH_KATEGORI_NAMA

- 5) Naskah dikirim melalui e-mail dalam bentuk lampiran (attachment), bukan dimasukkan ke dalam badan (box) e-mail.

Bentuk data yang dilampirkan bisa berupa file *Microsoft Word* atau *Pdf*.

- 6) Lampiran e-mail terdiri dari :

(a) Sinopsis & keunggulan naskah. Bila ada buku yang menjadi referensi sejenis, sebutkan judulnya. Tuliskan sinopsis dan keunggulan maksimal dalam 300 kata.

(b) Biodata penulis yang berisi nama, alamat domisili, alamat *e-mail*, nomor telepon rumah dan/atau ponsel.

(c) Naskah buku. Naskah yg dilengkapi dengan ilustrasi atau foto, harap dimasukkan ke dalam teks. Aura Publishing akan meminta file foto atau ilustrasi terpisah bila naskah sudah dikonfirmasi terbit. Naskah yang berbentuk komik atau cerita bergambar dikirim dalam format pdf.

Naskah dikirim dalam bentuk *soft-file* ke *e-mail* Aura Publishing, pihak Aura akan memberi *e-mail* balasan sebagai konfirmasi bahwa

naskah penulis sudah diterima. Setelah naskah diterima, maka akan diproses selama 2 (dua) bulan untuk konfirmasi terbit.¹³¹

Keuntungan pada sistem ini adalah penulis tidak perlu mengeluarkan biaya di awal. Tidak perlu menjual bukunya kepada perorangan karena sudah dijual melalui distributor dan toko buku. Namun ada beberapa kelemahan pada sistem ini, yakni penulis tidak bisa menentukan margin keuntungan dari harga jual buku. Sehingga apabila buku tidak laku maka keuntungan atau royalti yang diterima penulis akan sangat kecil. Penulis juga tidak dapat memperoleh royalti secara langsung dan sekaligus.

Selain 2 (dua) sistem penerbitan di atas, Aura Publishing juga menawarkan layanan cetak buku. AURA Printing memberikan layanan cetak berbagai jenis & ukuran buku, dari cetak satuan hingga ribuan. dengan mesin cetak buku teknologi terkini, yang dapat memberikan hasil cetakan dengan kualitas terbaik dan dengan harga yang kompetitif.

Layanan ini diperuntukan untuk seorang penulis yang sudah memiliki naskah lengkap dengan *design cover*, *layout*, ISBN, nama penerbit indie, dan sebagainya. Penulis atau pemilik naskah hanya perlu membayar biaya cetaknya saja.¹³²

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid*

B. Sistem Bagi Hasil Royalti antara Penulis dan Aura Publishing Bandarlampung

Saat ini terdapat dua sistem bagi hasil antara penulis dan Aura Publishing, yakni sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Penulis dan Penerbit Pada Sistem Penerbitan Indie (*Self-Publishing*)

Pada sistem penerbitan indie (*self-publishing*) Aura Publishing akan membantu proses promosi dan penjualan apabila dikehendaki oleh penulis. Sementara, Aura Publishing berhak menerima pembagian keuntungan sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan penulis. Hal ini tercantum pada surat perjanjian (kontrak kerjasama). Pembagian keuntungan tersebut dapat langsung diambil oleh penerbit ketika buku terjual.

Penulis buku *Menuju Keluarga Hafidzul-Qur'an*, Neny Suswati, mengatakan bahwa pada penerbitan buku pertamanya ia sangat terbantu dengan adanya layanan seperti ini, karena sangat memudahkan para penulis dalam penjualan *door to door*. Dengan demikian, proses penjualan tak memakan banyak biaya promosi dari penulis.¹³³ Saat itu buku pertamanya *Atas Nama Cinta*, diterbitkan dengan sistem indie di Aura Publishing. Aura Publishing membantu proses promosi dan penjualan melalui *website*-nya.

¹³³ Wawancara Neny Suswati, penulis 'Keluarga Hafidz', Juni 2018

2. Royalti Penulis dalam Sistem Penerbitan Mayor (*Mayor-Publishing*)

Berbeda dengan sistem penerbitan indie, pada sistem penerbitan mayor (*mayor-publishing*) Aura Publishing menawarkan pembagian keuntungan berupa royalti kepada penulis sebesar 10% dari harga jual buku. Misal harga jual buku Rp100.000,- maka honor/royalti yang diterima penulis yakni sebesar Rp10.000,- per buku ($\text{Rp}100.000 \times 10\%$). Pembayaran royalti pada sistem ini dilakukan setiap 6 sampai 12 bulan setelah buku terbit. Dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, proses promosi sepenuhnya akan dipegang oleh Aura Publishing. Namun, promosi dari penulis pribadi akan lebih membantu dalam membangun *branding* diri dan karyanya.

Dalam wawancara peneliti dengan pihak Aura Publishing, angka 10% untuk royalti penulis dipakai karena angka tersebut dianggap wajar dan umum diberlakukan di penerbit manapun.

Mas Ikhsan (Direktur Aura Publishing) dalam wawancara mengatakan,

“Angka 10% untuk penulis adalah angka yang wajar dan umum. Sebab perhitungannya begini, 100% dari harga jual buku akan dibagi menjadi 4 (empat) hal. Yang pertama, royalti penulis. Kedua, potongan untuk toko buku atau distributor. Ketiga, untuk biaya cetak. Kemudian yang terakhir untuk penerbit serta biaya risiko apabila ternyata buku tak habis terjual”.

Rincian pembagiannya yakni :

Persentase	Keterangan
10%	Royalti Penulis
40-45%	Toko Buku/Distributor
30-35%	Biaya Cetak Dan Terbit
15%	Penerbit Dan Biaya Risiko

Biaya risiko disebutkan di atas sebab hal tersebut memang menjadi tanggung jawab penerbit yang harus diketahui oleh penulis, bahkan masyarakat secara luas. Apabila buku tidak laku padahal sudah dicetak ribuan eksemplar dan disebar ke toko buku, maka yang menanggung kerugian adalah penerbit. Inilah yang menjadi acuan penerbit, khususnya Aura Publishing untuk menetapkan royalti penulis buku.

Sementara, umumnya toko buku sudah menetapkan standar pembagian keuntungan penjualan buku yakni kisaran 40-45%. Hal tersebut terkadang menjadi kendala dalam pembagian keuntungan penulis dan penerbit. Penulis dan penerbit berada di posisi riskan, sebab apabila harga buku dinaikkan agar keuntungan yang diperoleh penulis dan penerbit naik, maka dikhawatirkan buku tersebut kurang diterima pasar. Sulit menilai apakah penjualan buku tersebut akan tinggi atau tidak, walaupun secara kualitas naskah sudah baik atau pamor penulis yang sudah dikenal luas.

Royalti sebesar 10% akan diberikan kepada penulis sesuai akumulasi penjualan setelah 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas bulan) setelah buku

terbit. Apabila cetakan pertama dalam penerbitan mayor (1000 eksemplar atau lebih) tidak bisa habis terjual dalam 6 (enam) bulan pertama, maka tidak ada cetakan selanjutnya. Penentuan harga jual buku ditentukan bersama-sama antara penulis dan penerbit.¹³⁴ Kemudian harga jual itulah yang nanti akan dibagi sesuai presentase pada tabel pada halaman sebelumnya. Ketika mencapai kata sepakat, maka naskah akan diproses sesuai prosedur yakni proses pengeditan, penerbitan, cetak, dan distribusi.

Bagi sebagian penulis, pembayaran royalti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan merupakan waktu yang lama. Sebagian penulis merasa lebih menguntungkan jika memakai sistem penerbitan indie, karena keuntungan bisa langsung diterima penulis. Namun, ada pula beberapa penulis yang memiliki pendapat berbeda. Dalam wawancara bersama Izzah Annisa, penulis buku anak *10 Pahlawan Islam*, jangka waktu 6 (enam) bulan merupakan waktu yang wajar dan tidak terasa lama, apalagi jika royalti tersebut dapat mencukupi biaya hidup selama setahun. Misalnya dalam setahun penulis dapat membuat beberapa karya, maka royalti yang akan diperoleh dari karya-karya tersebut akan terus mengalir berkesinambungan. Oleh karena itu, penulis seharusnya bisa lebih produktif dan berkarya dengan baik, sehingga royalti bisa datang setiap bulan dengan jumlah yang cukup, bahkan lebih.¹³⁵

Menurut Izzah Annisa, hampir semua penerbit menerapkan kriteria dan hitungan yang sama terkait besarnya bagian royalti yang diterima penulis.

¹³⁴ Wawancara dengan Neny Suswati, penulis buku *parenting*, Juni 2018

¹³⁵ Wawancara dengan Izzah Annisa, penulis buku anak di Lampung, Juni 2018

Rata-rata 10%, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk naik hingga 12%. Jadi apa yang diterapkan di Aura Publishing sebagai penerbit pendatang baru adalah wajar dan tidak berbeda jauh dengan penerbit skala besar seperti Gramedia, Al-Kautsar, Bentang Pustaka, dan lain-lain.¹³⁶

Neny Suswati adalah penulis yang pertama kali memakai sistem penerbitan Mayor di Aura Publishing. Saat itu ia menerbitkan buku *Menuju Keluarga Hafidzul Qur'an* yang terjual hingga lebih dari 1000 eksemplar. Menurutnya, penjualan buku secara mayor mendatangkan keuntungan lebih besar dibanding buku pertamanya yang ia terbitkan indie. Dalam cetakan pertama dan kedua, buku tersebut habis dalam waktu kurang dari setahun dengan harga jual Rp.59.000. Selain itu, penjualan dengan sistem mayor terbilang lebih mudah karena penulis tidak perlu mengeluarkan dana di awal serta tak perlu repot menjual sendiri. Meskipun begitu, dalam hal promosi, penulis harus ikut serta mempromosikan bukunya. Sistem pembayaran royalti terbilang cukup lama, karena menunggu perhitungan yang jelas dari distributor dan toko buku terhadap buku yang terjual. Neny Suswati mengaku bahwa perhitungan jumlah bukunya yang terjual sempat mengalami kendala dari distributor dan toko buku, sehingga ia harus menunggu pembayaran royalti yang lebih lama.¹³⁷

Dalam buku terbarunya yang berjudul *Hafidz Rumahan*, Neny Suswati memilih untuk menggunakan sistem penerbitan indie di Aura Publishing. Menurutnya, meskipun harus mengeluarkan modal di awal untuk mencetak

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Wawancara dengan Neny Suswati, penulis buku *parenting*, Juni 2018

buku, namun dengan strategi penjualan yang bagus, penjualan buku bisa lebih optimal. Terbukti bahwa saat ini penjualan buku *Hafidz Rumahan* sudah mencapai tiga kali lipat dari penjualan buku *Menuju Keluarga Hafidzul Qur'an*. Dengan sistem agen, distributor, dan *reseller*, setiap orang maupun organisasi dan komunitas bisa menjualkan bukunya secara individu kepada masyarakat yang lebih luas. Saat ini Neny Suswati mengaku lebih senang menerbitkan buku dengan sistem indie, namun tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ia kembali menggunakan sistem penerbitan mayor. Hanya saja, ia berharap sistem penerbitan mayor bisa lebih sistematis dalam perhitungan buku dan menjamin royalti penulis buku yang dibayarkan tepat waktu sesuai perjanjian.¹³⁸

¹³⁸ Wawancara dengan Neny Suswati, penulis buku *Hafidz Rumahan*, April 2019

BAB IV

ANALISA DATA

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti dapatkan di lapangan, yang telah diuraikan pada BAB III serta merujuk pada BAB II sebagai landasan teori, maka analisa hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Analisis Sistem Penetapan dan Pembagian Royalti pada Aura Publishing

Kerjasama antara penulis dan penerbit kini bukan lagi menjadi hal tabu di masyarakat. Buku sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Buku juga sebagai bentuk konsistensi penulis dalam berkarya. Salah satu penerbit asal Lampung yang sudah dipercaya banyak penulis dan juga banyak melahirkan penulis baru adalah Penerbit Aura Publishing.

Dalam proses kerjasama penerbitan buku yang terjadi antara penulis dan Aura Publishing sebenarnya sudah terjadi suatu perjanjian. Perjanjian tersebut tertulis dalam sebuah kontrak kerjasama. Adapun proses kerjasama dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah:

1. Penulis memilih sistem penerbitan yang akan dipakainya. Apakah akan memakai sistem Penerbitan Indie atau sistem Penerbitan Mayor. Perjanjian penerbitan tertuang pada kontrak kerjasama.
2. Dalam sistem Penerbitan Indie, penulis harus membayar sejumlah uang sesuai paket yang tersedia, yakni Paket Populer dengan biaya Rp2.000.000. Benefit yang akan didapat penulis antara lain 50 eksemplar

buku (maksimal 100 halaman) dengan editing, ISBN, desain cover, terbit dalam 7 hari kerja, dan promo di *website* Aura Publishing.

3. Dalam sistem Penerbitan Indie, penulis berhak menentukan nilai jual bukunya sehingga penulis bebas menentukan jumlah keuntungan yang akan diperolehnya. Apabila buku terjual melalui Aura Publishing, maka Aura Publishing berhak mendapatkan 20% dari keuntungan yang diperoleh penulis. Misalnya modal yang dikeluarkan penulis Rp40.000 per buku, kemudian penulis jual dengan harga Rp60.000 per buku, maka keuntungan yang diperoleh penulis adalah Rp20.000. Oleh karena itu, melalui sistem bagi hasil penjualan ini, Aura Publishing berhak menerima 20% dari Rp20.000, yakni Rp4.000 per buku yang berhasil dijual melalui Aura Publishing sebagaimana tertulis pada halaman 85.
4. Pada sistem Penerbitan Mayor, penulis hanya perlu mengirim naskah. Seluruh biaya editing, cetak, promosi, dan distribusi ditanggung oleh Aura Publishing.
5. Pada sistem Penerbitan Mayor, Aura Publishing akan mencetak 1000 eksemplar yang akan didistribusikan ke toko buku online maupun offline.
6. Penetapan harga jual buku dalam sistem Penerbitan Mayor ditentukan oleh dua pihak, yaitu penulis dan Aura Publishing. Honorarium penulis buku pada Aura Publishing dibagi berdasarkan sistem presentase sebagaimana yang sudah dijelaskan pada halaman 70-71.
7. Pembagian keuntungan pada sistem Penerbitan Mayor ditentukan berdasarkan standar penerbitan sebagaimana tertuang dalam BAB III

halaman 86, penulis mendapatkan royalti sebesar 10%. Persentase pembagian keuntungan bisa saja berubah dengan persetujuan kedua pihak, yaitu Penulis dan Aura Publishing.

8. Setelah proses editing, cetak, dan penerbitan, buku kemudian didistribusikan serta dipromosikan. Dalam proses penjualan, semua pihak bersama-sama memiliki tanggung jawab dan andil yang besar untuk mempromosikan.
9. Royalti 10% akan dibayarkan kepada penulis setelah 6 (enam) bulan dari penerbitan.
10. Apabila cetakan pertama (1000 eksemplar) habis, maka buku dicetak kembali dengan persetujuan penulis dan penerbit.

Berdasarkan pembahasan teori pada BAB II, dalam suatu perjanjian (*'aqad*), ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah di mata hukum. Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada BAB II halaman 18, rukun dan syarat perjanjian (*'aqad*) antara lain:

1. *'Aqidain* – Pihak yang berakad

Dua pihak yang berakad (*'aqidain*) harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan sebuah kesepakatan, dan berakal sehingga mampu memahami ucapan dengan baik. Pihak-pihak yang berakad memiliki hak dan kewenangan atas objek yang diakadkan.

Dari hasil penelitian, perjanjian kerjasama antara penulis dan Aura Publishing sudah memenuhi rukun dan syarat yang pertama. Penulis dan Aura Publishing memiliki kecakapan hukum dan berakal (*Ahliyah*), penulis

merupakan pemilik sah dari naskah atau objek yang akan diakadkan, Aura Publishing juga memiliki kewenangan untuk mengelola naskah penulis sehingga menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan.

2. *Ma'uquh 'alaih* – Objek yang diakadkan

Berdasarkan teori tentang *ma'uquh 'alaih* yang telah peneliti paparkan pada halaman 18 dan syarat sahnya pada halaman 22, objek yang diakadkan harus ada ketika akad berlangsung, objek dibenarkan oleh *syara'*, objek harus jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

Berdasarkan hasil penelitian, objek dalam perjanjian penerbitan buku adalah naskah penulis. Naskah penulis telah ada ketika perjanjian atau kontrak kerjasama berlangsung. Isi naskah dibenarkan secara *syara'* artinya tidak mengandung hal-hal yang memicu kebencian dan perpecahan, naskah juga harus orisinil tidak boleh plagiat hasil karya orang lain. Naskah terlebih dahulu dibaca oleh pihak Aura Publishing, agar penerbit bisa menilai kelayakan dan nilai jual naskah tersebut. Oleh karena itu, perjanjian antara penulis dan Aura Publishing sudah memenuhi rukun dan syarat perjanjian yang kedua.

3. *Maqasidul 'Aqad* atau *Maudhu' al'aqad* – Maksud atau tujuan akad

Pada penjelasan tujuan akad pada Bab II halaman 19, ada syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan memiliki akibat hukum, antara lain tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada, misalnya sholat. Maka sholat tidak boleh dijadikan tujuan akad. Tujuan harus

berlangsung hingga akad berakhir, dan tujuan akad harus dibenarkan secara *syara*'.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian penulis dan Aura Publishing memiliki tujuan akad jangka panjang yakni memperoleh keuntungan dari pengelolaan naskah tersebut menjadi buku. Selain itu, penerbitan buku juga memiliki tujuan untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat, juga sebagai usaha mencari sumber rezeki dari menulis. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian antara penulis dan Aura Publishing memenuhi tujuan dalam berakad sesuai syariat Islam.

4. *Shighat* – Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah permulaan atas kehendak dari pihak pertama dan penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada Bab II halaman 20 dan syarat sahnya di halaman 23, shighat harus jelas dan tidak mengandung banyak pengertian, ijab dan qabul harus sesuai, dan menggambarkan kesungguhan para pihak, saling ridha, dan tidak dalam paksaan atau tekanan.

Berdasarkan hasil penelitian, shighat dalam perjanjian antara penulis dan Aura Publishing tertulis dalam kontrak kerjasama. Dalam kontrak kerjasama, kehendak dan penerimaan para pihak diatur dalam pasal-pasal. Kontrak kerjasama juga memberi penjelasan hak dan kewajiban para pihak, sehingga ketika kontrak kerjasama itu dibuat artinya kedua pihak saling ridha dan tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian penerbitan buku.

Terpenuhinya empat rukun dan syarat dalam perjanjian (*'aqad*) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau kontrak kerjasama antara Penulis dan Aura Publishing merupakan *'Aqad Shahih* atau sah menurut *syara'*. Sehingga mengikat kedua pihak untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang tertulis pada kontrak kerjasama.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Royalti Penulis Buku pada Aura Publishing

Berdasarkan teori tentang royalti yang telah peneliti uraikan pada Bab II halaman 68 skripsi ini, sistem pembagian royalti atau honorarium penulis buku diklasifikasikan menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sistem Persentase

Dalam praktiknya, sistem persentase adalah sistem yang paling sering dipakai oleh para penerbit untuk menjalin kerjasama bagi hasil dengan penulis. Pada sistem ini, penulis mendapat bagian keuntungan atau royalti sebesar 10% dari harga jual bukunya. Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada Bab II halaman 70, besarnya royalti yang diterima penulis telah menjadi angka wajar dalam kerjasama penerbitan. Namun tidak menutup kemungkinan besaran royalti tersebut naik maupun turun.

Berdasarkan uraian pada Bab II halaman 70, sistem persentase ini memiliki persamaan *'illat* dengan teori *mudharabah*, antara lain dalam objek, modal, pekerjaan, dan pembagian keuntungannya.

Aura Publishing juga memakai sistem persentase dalam pembagian keuntungan atau royalti penulis pada sistem penerbitan *mayor*, sebagaimana

yang telah peneliti uraikan pada Bab III halaman 86. Dengan demikian, sistem persentase yang dipakai Aura Publishing dapat ditinjau dengan teori *mudharabah*.

2. Sistem Termin

Berdasarkan uraian pada Bab II halaman 72, Sistem Termin memiliki kesamaan *illat* dengan teori upah dalam Islam (*Ijarah*). Dalam praktiknya, penerbit memberikan upah kepada penulis sesuai kesepakatan di awal. Upah tersebut kemudian diberikan dalam beberapa waktu, misalnya, di awal sebesar 40% dan sisanya akan diberikan 6 (enam) bulan kemudian.

3. Sistem Bagi Hasil Berupa Buku

Sistem ini memiliki kesamaan *illat* pada teori *mudharabah*. Perbedaannya, keuntungan yang diterima penulis bukan berupa uang, namun berupa buku. Berdasarkan uraian pada Bab II halaman 72, sistem ini sudah jarang dipraktikkan karena sistem ini bisa menjadi *boomerang* bagi penerbit. Misalnya, jika penulis menjual bukunya dengan harga lebih rendah dari penerbit, maka hal tersebut dapat merusak harga pasar dan merugikan penerbit.

4. Sistem Lepas atau Penjualan Hak Cipta

Berdasarkan uraian peneliti pada Bab II halaman 73, sistem ini memiliki kesamaan *illat* dengan teori jual beli dalam Islam. Hal ini disebabkan penulis menjual naskahnya kepada penerbit dan dibayar dalam harga yang disepakati bersama. Setelah bersepakat, maka naskah menjadi milik

penerbit dan penulis tidak mendapatkan bagian keuntungan di kemudian hari.

Secara umum, prinsip Hukum Islam dalam bermu'amalah dilandaskan pada beberapa hal, diantaranya:

- a. Segala bentuk *mu'amalah* hukumnya mubah sampai ada dalil yang melarangnya
- b. *Mu'amalah* dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan di dalamnya
- c. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan menghindari kedzaliman dan aniaya
- d. *Mu'amalah* dilakukan dengan tujuan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.

Berdasarkan prinsip-prinsip bermu'amalah di atas, *Mudharabah* atau kerjasama bagi hasil adalah salah satu bentuknya. Pelaksanaan *mudharabah* dalam kehidupan bermu'amalah harus memenuhi keempat prinsip di atas.

Berbeda dengan akad jual beli, menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang tertuang dalam Bab II halaman 40, rukun dan syarat *mudharabah* ada lima, yakni harta atau modal, pekerjaan, keuntungan, shighat, dan dua orang yang berakad. Oleh karena itu, ketika memulai akad *mudharabah* harus menyebutkan pekerjaan dan keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak.

1. Harta atau modal

Syarat harta atau modal dalam kegiatan *mudharabah* sebagaimana dijelaskan pada halaman 44 adalah harta berupa uang atau barang yang bernilai, tunai atau tidak hutang, modal dapat diketahui jumlahnya, diketahui

oleh pemiliknya, dan hendaknya diserahkan kepada pekerja untuk dikelola agar mencapai tujuan dari *mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama bagi hasil antara penulis dan Aura Publishing, harta atau modal yang dipakai untuk bekerjasama adalah naskah penulis. Naskah merupakan sesuatu yang dapat diketahui nilainya, diketahui oleh pemiliknya (penulis), dan diserahkan kepada Aura Publishing untuk dikelola dan diproduksi hingga mendatangkan keuntungan yang kemudian akan dibagi sesuai kontrak kerjasama. Dalam hal ini, penulis mendapatkan royalti atau bagian keuntungan sebesar 10%.

Dengan demikian, kerjasama antara penulis dan Aura Publishing dapat dikatakan memenuhi rukun pertama *mudharabah*.

2. Pekerjaan

Sebagaimana telah peneliti tuangkan pada halaman 46, pekerjaan yang diperbolehkan dalam akad *mudharabah* adalah pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam praktik kerjasama antara penulis dan Aura Publishing, pekerjaan yang dimaksud adalah proses penulisan naskah, mengelola naskah melalui proses editing, cetak, terbit, hingga distribusi dan penjualan.

Dengan demikian, kerjasama ini memenuhi rukun kedua dari *mudharabah*, karena pekerjaan semacam itu adalah usaha untuk mendatangkan keuntungan.

3. Keuntungan

Dalam akad *mudharabah*, keuntungan dibagi antara pemodal dan pekerja karena pemodal menerima keuntungan karena modalnya dan pekerja menerima keuntungan karena pekerjaannya, sebagaimana yang tertuang pada

halaman 46, 47, dan 48. Pembagian keuntungan diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang berakad, misalnya seperdua, sepertiga, dan seterusnya, serta harus disepakati kedua belah pihak (halaman 48). Keuntungan akan diberikan ketika tujuan mudharabah tercapai.

Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari kerjasama bagi hasil antara penulis dan penerbit Aura Publishing dibagi kepada penulis, penerbit dan toko buku atau distributor (halaman 88-89). Hal tersebut dilakukan karena toko buku juga memiliki andil dalam proses penjualan dan promosi. Namun, toko buku sudah menetapkan standar perolehan keuntungan yakni mencapai 40-45% dari harga jual buku (halaman 89). Sangat jauh jika dibandingkan dengan bagian keuntungan yang diperoleh penulis 10% dan penerbit 15%.

Namun, dengan adanya kontrak kerjasama, artinya para pihak sudah mengetahui secara jelas bagian keuntungannya masing-masing. Ketika penulis menyetujui kontrak kerjasama, artinya penulis menunjukkan kerelaan untuk mendapat royalti 10%. Royalti diberikan kepada penulis 6 bulan setelah buku terbit, hal tersebut karena perhitungan penjualan buku dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sehingga keuntungan yang diperoleh akan diterima setelah perhitungan. Dengan demikian, praktik kerjasama antara penulis dan penerbit Aura Publishing sudah memenuhi rukun mudharabah yang ketiga.

4. *Shighat*

Shighat dalam *mudharabah* boleh dengan ucapan apa saja yang membawa makna bagi hasil (halaman 42). *Shighat* tidak boleh ada syarat, misal jual beli harus dilakukan setelah tempo tertentu, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian, *shighat* atau *ijab qabul* dalam kerjasama bagi hasil penulis dan penerbit berupa royalti sudah tertuang dalam kontrak kerjasama. Isi kontrak kerjasama secara jelas menunjukkan maksud dan tujuan akad tanpa memberi syarat tertentu (yang dapat mempersulit) pada satu pihak. Sehingga kerjasama ini sudah memenuhi rukun *mudharabah* yang keempat.

5. Dua pihak yang berakad

Dua pihak yang berakad dalam *mudharabah* adalah *Shohibul Maal* yakni pemilik modal dan *Mudharib* yaitu pekerja. Atas dasar saling membutuhkan, kedua pihak ini bekerjasama untuk mencapai tujuan yang dibenarkan oleh *syara'*, oleh karena itu kedua pihak yang berakad harus memenuhi syarat antara lain baligh, berakal, pekerja tidak dibatasi pekerjaannya sehingga menghambat tercapainya tujuan (halaman 43).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dan Aura Publishing adalah dua pihak yang berakad. Penulis sebagai pemilik modal berupa naskah dan Aura Publishing sebagai pekerja yang mengelola naskah tersebut. Dalam praktiknya, Aura Publishing diberi kebebasan untuk mengelola naskah agar tujuan dari kerjasama itu tercapai. Sehingga dapat dikatakan kerjasama ini sudah memenuhi rukun *mudharabah* yang kelima.

Terpenuhinya kelima rukun dan syarat *mudharabah*, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil berupa royalti antara penulis dan penerbit Aura Publishing adalah *shahih* dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

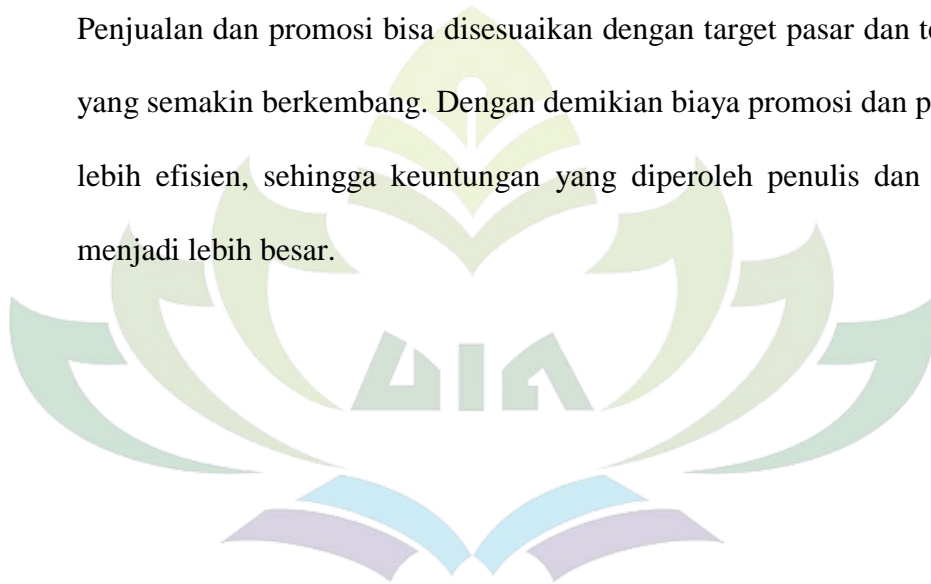
A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta hasil penelitian dan analisa peneliti, maka praktik kerjasama antara penulis dan Aura Publishing serta tinjauan Hukum Islam tentang royalti antara penulis pada Aura Publishing dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua tipe kerjasama bagi hasil antara penulis dan penerbit Aura Publishing. Pertama, berupa keuntungan yang diterima penerbit atas jasa penjualan buku pada sistem penerbitan indie. Kedua, berupa royalti penulis pada sistem penerbitan mayor, yakni penulis memperoleh royalti sebesar 10% dari penjualan buku yang diterbitkan dengan sistem mayor oleh Aura Publishing. Royalti diberikan kepada penulis 6 bulan setelah buku terbit, hal ini berkaitan dengan perhitungan hasil penjualan yang dilakukan 6 bulan sekali.
2. Tinjauan Hukum Islam berdasarkan teori *Mudharabah* tentang royalti penulis buku pada Aura Publishing Bandarlampung adalah *shahih* dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. Toko buku sebaiknya menurunkan standar keuntungan agar perolehan keuntungan antara penulis, penerbit, dan toko buku lebih merata.
2. Penulis hendaknya semakin produktif menghasilkan karya yang berkualitas agar royalti bisa diperoleh dari banyak karya yang terjual.
3. Penerbit harus bisa menciptakan sistem penjualan dan promosi yang baik sehingga penjualan buku tidak bergantung pada toko buku besar. Penjualan dan promosi bisa disesuaikan dengan target pasar dan teknologi yang semakin berkembang. Dengan demikian biaya promosi dan penjualan lebih efisien, sehingga keuntungan yang diperoleh penulis dan penerbit menjadi lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zainal, 2002, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada
- Ash-Shofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shiddieqy, Hasby, 2009, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizky Putra
- _____, 1992, *Pengantar Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang
- Asyhadie, Zaeni, 2012, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Edisi Revisi. Cetakan 6*, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada
- Aura Publishing, 2014, *Company Profile*, Bandarlampung: Aura Publishing
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Bandung: Sygma
- Dewi, Gemala, dkk, 2005, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hajar Al-Asqolani, Ibnu, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyr Al Misyriyyah
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kartono, Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mondar Maju
- Mamang, Etta, Sangadji dan Sopiha, 2010, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, Yogyakarta : Andi
- Muhammad, 2004, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Fak. Ekonomi UII
- _____, 2008, *Managemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah, 2011, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Qardhawi, Yusuf, 2003, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: Muammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu
- Quthb, Sayyid, 2000, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Quran, Jilid I*, Jakarta: Gema Insani Press
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid, 1993, *Fiqih Sunnah, Jilid 13*, Bandung: Ma'arif
- Sahrani, Sohari, dan Ruf'ah Abdullah, 2011, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sahroni, Oni, dan Hasanuddin, , 2017, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sembiring, Sentosa, 2013, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bandung : Nuansa Aulia
- Shihab, M. Quraish, 2001, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Cet 2, Jakarta: Lentera Hati
- Suhendi, Hendi, 2013, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumadi, 2013, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanto, Burhanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Tahir, Muhammad, Mansoori, 2009, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Bogor: UII Albaab

Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, 2013, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008*, Cet. I, Jakarta: MA RI

Zen, Achmad, 2011, *Perjanjian TRIPs Dan Beberapa Isu Strategis, Edisi 1, Cetakan 1*, Jakarta-Bandung: Badan Penerbit FHUI & Penerbit PT Alumni

